

**PENGARUH KUALITAS INFORMASI KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN DEMAK**

PROPOSAL SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh :

ITA AUDINA

1705046050

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Ita Audina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ita Audina

NIM : 1705046050

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Demak**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Maret 2023

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Ari Kristin P., SE., M. Si
NIP. 19790512 200501 2 004



Faris Shalahudin Zakiy, M.E.
NIP.19900227 201903 1 012

PENGESAHAN

Skripsi Saudari :Ita Audina
NIM :1705046050
Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ SI Akuntansi Syariah
Judul :Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Demak

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal

10 April 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2022/2023

Semarang , April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Ana Zahrotun Nihayah, S.E., M.A.
198907082019032018
Penguji Utama I

Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si.
197905122005012004
Penguji Utama II



Dessy Noor Farida, S.E., M.Si.
197912222015032001
Pembimbing I



Warno, S.E., M.Si.
NIP. 198307212015031002
Pembimbing II



Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si.
NIP.197905122005012004

Faris Shalahudin Zakiy, M.E.
NIP.19900227 201903 1 012

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S Al Baqarah: 153)

“Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepada-Nya lah kita semua kembali”.

(Q.S Al Baqarah: 156)

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”.

(Q.S Az Zumar:10)

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan (melihat) balasan-Nya”.

(Q.S Al Zalzalah: 7)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, namun jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih”.

(Q.S Ibrahim:7)

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui”.

(Q.S Al Ankabut: 64)

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan terimakasih, dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan karya sederhana dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Sulastri, yang setia mengiringi setiap langkah saya dengan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat serta doa yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan memperlancar segala urusan Bapak dan Ibu.
2. Saudara kandung saya, Mas Rif'an, Mbak Lia, Mas Rifki, Anis, Ando yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang penuh ditulisa oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Maret 2023

Deklator



Ita Audina

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak ditemukan nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Z (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan huruf gabungan *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan huruf gabungan *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya: (الْفَاتِحَةُ) *al-fātihah*.
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf Alif-lam, transliterasinya dalam tulisan latin dilambang dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misal (الْبَيْتُ = *al-bayt*).
6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti *ber-harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah alhiḷal* atau *ru'yatul hiḷal*)

7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةٌ = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqaḥā'*).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Objek pada penelitian ini adalah pemerintahan Kabupaten Demak.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan di SKPD Kabupaten Demak, penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner sebanyak 70 kuesioner, dengan rincian 3 kuesioner tidak kembali, 2 kuesioner tidak dapat diolah dikarenakan ada beberapa poin yang tidak dijawab dengan lengkap termasuk data diri, dan 65 kuesioner bisa diolah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan berpengaruh positif serta signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh positif serta signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern, transparansi, aksesibilitas laporan keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an effect to the quality of financial information, accesibility of financial reports and internal control systems on the transparency of regional management. The object of this research is the goverment of Demak Regency.

The type used in this research is quantitative. The data used are in the form of primary data and secondary data, the population in this study is the staff of the finance section at SKPD Demak Regency, this study used a questionnaire instrument of 70 questionnaires, with details of 3 questionnairesnot being returned, 2 questionnaires could not be accessed because there were several points that were not answered in full including personal data, and 65 questionnaires can be processed. Test in this study using multiple linear regression analysis using the SPSS program. This study used a purposive sampling technique.

The results-of this study indicate that qallity of financial information ha a positive and significant effect on the transparency of regional financial management, the accesibility of financial reports ha a positive and insignificant effect on the transparency of regional financial management, the internal control system ha a positive and significant effect on the transparency of regional financial management.

Keyword: *quality of financial information, accesibility of financial reports, apprentice control system, transparency, accesibility of financial reports.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, *dzat* yang menurut Al-Qur'an tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Demak

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan, saran serta dukungan dalam bentuk moril maupun materil dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE, M.Si., Akt. CA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, SE, M.Si. selaku Sekjur Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin P., SE, M.Si selaku pembimbing I, yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Faris Shalahuddin Zakiy, M.E selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan bantuan serta saran dalam proses penulisan skripsi ini
6. Seluruh dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Bapak Zainal Abidin dan ibu Sulastri selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan mendoakan yang terbaik untuk penulis, serta menjadi motivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara kandung penulis. Mas Rif'an, mbak Lia, mas rifki, Anis dan Ando. Juga keponakan penulis, Nabila, Alifia, Afika, Arka, Asraf, Akhtar yang selalu menghibur penulis disaat penulis merasa jenuh dalam pengerjaan skripsi.
10. Rini Sulistyowati selaku sahabat penulis sejak kecil, yang selalu memberikan nasehat dan menyemangati penulis saat dalam masa sulit.
11. Sahabat-sahabatku tersayang "*Lucnut Friends*". Affi, Azza, Eva, Fadhila, Leli, Maulida, Regina, Shoimul, Sri, dan Wilda yang selalu membantu, menemani, menyemangati, dan memberikan motivasi kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
12. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2017 dan seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
13. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan serta saran dalam pembuatan skripsi ini baik dari segi moral maupun materil yangng tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari materi maupun dalam penulisannya.

Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan selanjutnya. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, Maret 2023

Ita Audina

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori keagenan (<i>Agency Theory</i>)	8
2.1.2 Keuangan daerah.....	11
2.1.3 Kualitas informasi keuangan.....	15
2.1.4 Aksesibilitas laporan keuangan.....	17
2.1.5 Sistem Pengendalian Intern.....	18
2.1.6 Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Hipotesis Penelitian	27
2.4 Kerangka Berpikir.....	28
BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30

3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Data Penelitian	30
3.2.2 Sumber Data Penelitian.....	30
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.3.1 Populasi.....	31
3.3.2 Sampel.....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5 Variabel Penelitian.....	32
3.5.1 Variabel Dependen (variabel terikat).....	32
3.5.2 Variabel Independen (variabel bebas).....	32
3.6 Variabel Penelitian dan Pengukuran	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
3.7.1 Statistik Deskriptif	34
3.7.2 Uji Instrumen Penelitian	35
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.7.4 Uji Ketepatan Model.....	36
3.7.5 Uji Hipotesis	37
BAB IV	39
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum.....	39
4.1.1 Sejarah Kabupaten Demak.....	39
4.1.2 Letak Geografis.....	41
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	41
4.2.1 Deskripsi Data Responden	41
4.2.2 Statistik Deskriptif	44
4.2.3 Uji Instrumen	44
4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	47
4.2.5 Uji Ketepatan Model.....	51
4.2.6 Uji Regresi Linier Berganda	54
4.3 Pembahasan dan Analisis Data	57
4.3.1 Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	57

4.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	58
4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	59
BAB V	61
PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	61
5.3 Saran	62
5.4 Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	48
Gambar 4.2.....	50

DAFTAR TABEL

Table 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	42
Table 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Table 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden.....	43
Table 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	43
Table 4. 5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	44
Table 4. 6 Uji Validitas	45
Table 4. 7 Uji Reliabilitas	47
Table 4. 8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	48
Table 4. 9 Uji Multikolinearitas.....	49
Table 4. 10 Uji Gletser.....	51
Table 4. 11 Uji Determinasi	51
Table 4. 12 Uji Simultan	52
Table 4. 13 Uji Parsial	53
Table 4. 14 Uji Regresi Linear Berganda	55
Table 4. 15 Frekuensi Jawaban Responden	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, transparansi juga akuntabilitas pada suatu laporan keuangan mendapat perhatian tinggi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadinya penyerahan otoritas dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah karena akibat adanya otonomi daerah, hal tersebut menimbulkan pergeseran yang besar dalam format pengeluaran anggaran pada pemerintahan pusat juga pemerintahan daerah.¹ Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan otoritas pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah otonom dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara.² Dalam UU Nomer 23 tahun 2014, otonomi daerah yaitu suatu pemberian kewenangan kepada daerah terkait dalam mengurus serta mengelola kebutuhan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan Sistem Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berakibat pada berbagai bidang termasuk bidang keuangan daerah.

Sejalan bersama diterapkannya UU Nomer 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat mengharapkan terciptanya konsep *good governance* pada pelaksanaan pemerintah daerah. Agar *good governance* yang tercipta bisa dikatakan sukses, komitmen dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan adanya aspirasi dari masyarakat, konsep *good governance* yang menjadi salah satu prasyarat utama akan mewujudkan pemerintahan yang dicita-citakan.³ Dalam pelaksanaannya, diperlukan adanya pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata. Seingga akan menimbulkan pemerintahan yang bertanggung jawab, juga terbebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dengan diterbitkannya UU Nomer 9 tahun 2015 (perubahan kedua atas UU Nomer 23 Tahun 2014) diharapkan pemerintah wilayah setempat dapat melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ada berbagai upaya dalam melaksanakan *good governance* salah satunya adalah mengembangkan transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Apabila transparansi juga akuntabilitas tidak dilaksanakan dalam sistem pengelolaan keuangan hal itu akan menimbulkan sebuah

¹ Salomi J. Hehanussa, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon," *Journal of Chemical Information and Modeling* 02, no. 01 (2015): 82–90.
² Helmiang Pemerintah Daerah Undang-Undang No 32 Tahun 2004, "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," *Undang-Undang No 32 Tahun 2004*, <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>. Hal. 4-5

³ LAN & BPKP RI, "Akuntabilitas Dan Good Governance," *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* (2000): 2. Hal. 1

kebohongan atau karangan palsu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya.

Seluruh lembaga baik dari sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintah juga tak luput dari perhatian. Masyarakat menuntut pemerintah agar melaksanakan tugasnya secara transparan, efektif, dan efisien. Pembuatan laporan keuangan harus dikelola secara jujur dan dilampirkan data administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna untuk memenuhi kepuasan masyarakat.

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menunjang terwujudnya sebuah transparansi dan akuntabilitas, hal itu diperjelas dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur atau membuat aturan dan tata cara untuk mengelola keuangan daerah dalam bentuk hukum (peraturan) daerah. Supaya transparansi juga akuntabilitas terwujud di lingkungan pemerintah, pemerintah seharusnya merombak ulang dalam hal menyajikan laporan keuangan, dengan cara diberikannya laporan keuangan yang berkualitas dan diungkapkan kepada masyarakat guna untuk menjalankan amanat dari rakyat.⁴

Pada dasarnya transparansi ialah bentuk terbukanya pemerintahan untuk mengungkapkan informasi-informasi terkait pengelolaan kegiatan sumber daya publik terhadap pihak yang memerlukan suatu informasi. Transparansi dapat dikatakan efektif apabila masyarakat atau pihak yang memerlukan informasi dapat mengaksesnya dan dapat dipahami. Pengaksesan dapat diberikan atau dikirimkan melalui media *website* (internet), siaran televisi, surat kabar, radio maupun forum yang memberikan kontribusi dalam mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.⁵

Salah satu cara agar keuangan terkelola dengan transparan serta memiliki akuntabilitas yang baik adalah dengan mewajibkan pengelola merancang pelaporan keuangan yang sebanding terhadap aktivitas keuangan di tempat tersebut. Maka sebab itu, diperlukan suatu sistem yang diprogram melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sehingga hal itu diharap pengelola bisa

⁴ Salomi J Hehanussa, "Kutip 1 (Salomi J. Hehanussa)," *Conference in Busniess, Accounting and Management* 2 (2015): 82–90. Hal. 82

⁵ M Apip and F Maesaroh, "Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis," *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi* 4, no. 1 (2016): 28–39, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jawara/article/view/3395>. Hal. 28

menciptakan keuangan pemerintahan daerah yang terkelola dengan tanggung jawab yang baik, bersih, jujur, serta adil.⁶

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu organisasi dalam mewujudkan cita-cita yang dikukuhkan dengan sarana yang bertanggung jawab dan dilakukan berkala.⁷ Didalam pemerintah daerah, hal tersebut memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan pelaporan keuangan pemerintah dituntut untuk meraih predikat terbaik dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada saat proses auditing oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait dengan keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan kinerja kepada masyarakat sekarang dapat dilihat melalui berbagai sarana macam koran, siaran radio ataupun platform resmi pemerintah daerah tersebut. Aksebilitas laporan keuangan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berita terkait laporan keuangan daerahnya sendiri.

Transparansi juga akuntabilitas memiliki perbedaan tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam menciptakan laporan keuangan yang akuntabel perlu diberlakukannya laporan yang transparan. Apabila akuntabilitas tidak dibarengi dengan transparansi proses pelaporan, hal itu dapat dikatakan sebagai penyelewengan dan masyarakat tidak mendapatkan informasi keuangan sebagaimana mestinya.

Untuk merancang suatu laporan keuangan, pemerintah diwajibkan mengikuti standar akuntansi yang sudah diberlakukan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomer 12 Tahun 2019 pasal 187 ayat 2, penyajian laporan keuangan sedikitnya harus meliputi: laporan realisasi anggaran yang berisi tentang rasio diantara taksiran dengan terealisasinya taksiran tersebut dalam satu waktu, rubahnya pelaporan sisa dana taksiran lebih menginformasikan naik dan turunnya sisa dana taksiran berlebih periode laporan dengan periode yang lalu, neraca yang melukiskan bagian keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan modal, juga catatan atas laporan keuangan.^{8 9}

⁶ Maria Magdalena Hesti Kurniawati, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)," *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hata* 8 (2) (2016): 15–27, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73794>. Hal. 2

⁷ LAN & BPKP RI, "Akuntabilitas Dan Good Governance." Hal. 21

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Media Hukum* (2019): 184.

⁹ Deddy Nordiawan, Iswahyudi Sendi Putra, and Maulidah Rahmawati, *Akuntansi Pemerintahan*, 2008. Hal. 17-19

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang melakukan riset tentang upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya agar terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya adalah kualitas pelaporan keuangan, pelaporan keuangan tidak dianggap dengan kualitas yang baik jika penyajiannya tidak cocok dengan aturan yang telah diberlakukan. Mengingat pemerintahan daerah merupakan lembaga yang penting dalam menjalankan suatu daerah, maka pemerintah daerah juga harus menyajikan atau melaporkan keuangan yang berkualitas pula. Menurut Siti Aliyah dan Aida Nahar pada pemerintah daerah kabupaten Jepara, terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap transparansi juga akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, artinya makin tingginya pemerintah dalam menyajikan pelaporan keuangan dengan kualitas yang baik maka semakin tinggi pula transparansi suatu lembaga.

Upaya lain untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah dengan mempermudah aksesibilitas laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga pemerintah daerah merupakan salah satu lembaga yang harus memberikan kemudahan dalam mengakses hasil dari kinerja pemerintah. Pada tahun 2019, kementerian keuangan meluncurkan sebuah aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online berbasis dimana semua laporan keuangan dari 34 provinsi serta 542 kabupaten atau kota bisa diakses, menggantikan situs website yang kerap dikeluhkan masyarakat dikarenakan website tersebut tidak mobile friendly. Dengan diciptakannya aplikasi ini diharapkan agar masyarakat dapat berdebat dengan data juga tidak lagi berbicara omong kosong tanpa adanya bukti yang benar dan jelas.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Embun Widyasari (2017) pada kabupaten Indragiri Hulu mengungkapkan hasil yang menyatakan adanya pengaruh positif diantara aksesibilitas laporan keuangan pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Hal itu menampilkan apabila masyarakat atau *stakeholder* semakin mudah membuka laporan keuangan pemerintah maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah yang bersangkutan telah mengimplementasikan sistem transparansi. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, Junaidi dan Achdiar Redy Setiawan (2015) studi kasus kabupaten Lamongan, adanya pengaruh yang positif antara aksesibilitas laporan keuangan pada transparansi laporan keuangan. Dengan dimudahkannya aksesibilitas pemerintahan daerah maka semakin meningkat pula tingkat transparansi pemerintah.

Upaya selanjutnya adalah dengan meningkatkan sistem pengendalian intern. Dengan mengaplikasikannya secara benar dapat menguatkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang sesuai disetiap SKPD. Juga apabila diterapkan

pengendalian internal yang sesuai dapat meningkatkan kepercayaan terhadap andalnya pelaporan keuangan, dan dapat menumbuhkan kepercayaan *stakeholder* atau masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Embun Widya Sari (2017) pada kabupaten Indragiri Hulu, menyampaikan jika sistem pengendalian internal memiliki pengaruh pada transparansi juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dapat diartikan bila sistem pengendalian intern terhadap cara mengelola keuangan daerah bisa dilaksanakan pemimpin serta semua perangkat yang terkait, jadi nantinya dapat tercipta pelaporan keuangan yang andal serta informatif, terwujudnya perlindungan aset negara dan terjaminnya kepatuhan tiap lembaga pada aturan undang-undang yang berlaku.

Fenomena pada penelitian ini yaitu masih ditemukannya kelemahan pengendalian internal dan indisciplin terhadap peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dalam kurun waktu lima tahun, meskipun diberikannya Opini pada laporan keuangan yang dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun pelaporan 2016-2021. Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan, BPK menilai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun anggaran 2016-2021 sudah ditampilkan dengan wajar di setiap hal material. Meskipun masih ada penjelasan paragraf yang diberikan seperti: tata kelola serta penata usahaan aset tak bergerak dan aset yang lain belum sepenuhnya terpenuhi, pengendalian atas penghapusan barang milik daerah belum memadai, penatausahaan aset tetap belum tertib, pengamanan administrasi dan fisik aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak belum sepenuhnya dilakukan, dan pengelolaan piutang retribusi pada Dinlutkan, DPMPTSP serta Dindagkop dan UKM belum tertib.

Dengan masih adanya kelemahan pengendalian intern tersebut menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Demak masih lemah dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan layanan terhadap *stakeholder*.

Pemerintah kabupaten Demak merupakan entitas yang juga memiliki permasalahan aksesibilitas laporan keuangan. Dimana pada salah satu laporan keuangan pada periode 2020 tidak dapat diakses atau dibuka. Hal tersebut menyulitkan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui dan menggunakan laporan keuangan yang terjadi ditahun tersebut.

Juga dalam hal penggunaan *website* belum secara maksimal, membuat hal tersebut belum bisa diperlihatkan secara umum kepada *stakeholder*/masyarakat yang ingin mengetahuinya. Selain itu dalam kasus keterbukaan, pelaporan

keuangan pemerintah kabupaten Demak belum efektif serta transparansinya kurang terhadap *stakeholder*. Dikarenakan publikasi pelaporan keuangan hanya dilakukan di lingkup pemerintahan saja dan masyarakat sebagai peran utama belum terkena dampaknya.

Dari uraian yang dijelaskan dilatarbelakang diatas, maka peneliti ingin membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Demak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas informasi keuangan berpengaruh terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah kabupaten Demak yaitu sebagai acuan terkait kualitas informasi keuangan guna meningkatkan aksibilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya yakni untuk sarana informasi dalam melaksanakan riset berikutnya untuk lebih baik lagi terkait kualitas informasi juga aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Untuk Perguruan Tinggi atau Universitas yaitu diharapkan bisa digunakan sebagai referensi maupun sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini adalah sebuah kerangka yang melukiskan proses kerangka pikiran dari awal sampai akhir penelitian, adapun sistematika penelitian ini yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, dijelaskan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dalam melakukan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang berbagai macam teori juga penjelasan tiap variabel bebas (kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern) serta variabel terikat (transparansi pengelolaan keuangan daerah).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan. Yang memuat jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data penelitian, variabel serta pengukuran penelitian, juga teknik analisis data penelitian.

BAB IV : ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum bagaimana tahapan penelitian serta hasil dalam penelitian ini, termasuk didalamnya memuat hasil analisis “Pengaruh kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Demak”.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan yang sudah di peroleh dalam melakukan penelitian, keterbatasan dalam penelitian ini serta saran bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan teori agensi, karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari prinsipal kepada agen. Pelimpahan ini menimbulkan pemisahan antara klaiman residu dengan otoritas pengambilan keputusan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan agent, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.¹⁰ Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, yudikatif dengan publik atau masyarakat.

Dalam peraturan tersebut, dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Pemerintah sebagai agen bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan masyarakatnya dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan masyarakat, pemerintah diharuskan memberikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat mengukur, menilai, dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut dalam mengelola sumber daya untuk menyejahterahkan masyarakat.

Namun dalam penyampaian laporan keuangan, pemerintah daerah sebagai pemilik informasi keuangan daerah terkadang hanya memaksimalkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam beberapa periode, pemerintah tidak memberikan laporan keuangan. Akibatnya masyarakat tidak dapat mengetahui tindakan pemerintah mengenai keputusan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan timbulnya biaya keagenan yang ditanggung pemerintah sebagai salah satu usaha yang dilakukan dalam upaya memberikan informasi keuangan kepada masyarakat. Jensen dan Meckling (1976) juga

¹⁰ Riri Zelmianti, "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK)* 7, no. 1 (2016): 11–21. Hal 12

menjelaskan bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) biaya yang diakibatkan dari adanya simetri informasi¹¹ :

1. *Monitoring cost*, biaya yang digunakan untuk mengawasi perilaku agen,
2. *Bonding cost*, biaya yang menjamin bahwa agen tidak akan bertindak untuk kepentingan pribadi,
3. *Residual cost*, kerugian yang ditanggung oleh agen akibat dari penyimpangan keputusan yang diambil prinsipal.

Hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan kontrak, baik eksplisit maupun implisit sebagai acuan pranata perilaku partisipan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa, hubungan keagenan terjadi pada semua entitas.

Adanya dua partisipan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi sebagai berikut¹²:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk *rationality* dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim dan Abdullah (2003) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai berikut.¹³

1. Pola hubungan instruktif,
2. Pola hubungan konsultatif,

¹¹ Adni Dwi Astuti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Via Website (Studi Empiris Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Periode 2018)," *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 132–138. Hal. 135

¹² Ernie Hendrawaty, *Excess Cash Dalam Teori Keagenan*, 2017. Hal. 27028

¹³ Zelmianti, "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)." Hal. 13

3. Pola hubungan partisipatif,
4. Pola hubungan delegatif,

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Pemerintah pusat pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Ketiga fungsi tersebut dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Warsito, 2008; 48).¹⁴

Dalam Islam, konsepsi kerjasama kontraktual memiliki perspektif yang berbeda dengan pandangan barat. Agama Islam mendasarkan kerjasama pada sikap amanah (*trust*), tanggungjawab kedua belah pihak dan bertawakal kepada Allah SWT.¹⁵ Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan sikap positif dalam hubungan atau kontak dengan sesama manusia, terlebih dengan sesama muslim. Hal ini akan mewujudkan sikap saling percaya. Jika hak-hak agen yang menjadi kewajiban principal atau masyarakat ditunaikan, maka dengan sendirinya pemerintah akan memenuhi kewajibannya. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Salah satu sifat yang beriman adalah menjaga amanah dan janji yang dipikulnya. Amanah merupakan salah satu konsep yang memiliki arti dan kedudukan yang penting dalam Al-Qur'an dan Islam. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mu'minun: 8).

Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa salah satu sifat dari orang mukmin yang beruntung ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik dari Allah maupun dari sesama manusia. Tidak terkecuali apabila seseorang mengadakan perjanjian, mereka harus menepatinya dengan sempurna. Dalam suraah yang lain, yaitu QS. Al-Anfaal ayat 27, Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman:

¹⁴ Ibid. Hal 13

¹⁵ Achmad Uzaimi, “Teori Keagenan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* 1, no. 1 (2017): 71–78. Hal. 72

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (QS. Al-Anfaal: 27).

Dalam QS. Al-Anfaal ayat 27 dijelaskan bahwa Allah menyeru kaum muslim untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan tidak mengabaikan kewajiban yang telah diperintahkan dan tidak melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh semua kalangan masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercaya untuk mengurus kepentingan warganya. Peraturan-peraturan itu secara prinsip telah diberikan ketentuannya secara garis besar di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dengan begitu, segala urusan yang bersangkutan dengan masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Karena itu segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh dikhianati dan dan wajib ditaati sebagaimana mestinya.

2.1.2 Keuangan daerah

Aspek keuangan ialah kriteria mendasar agar bisa mengetahui kemampuan daerah untuk mengelola rumah tangganya guna membiayai keperluan keuangan daerahnya dan tidak tergantung dengan pertolongan serta subsidi yang diberikan pemerintahan pusat. Akibat dari dicetuskannya kebijakan otonomi daerah, hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Tujuan pemerintah daerah bisa terwujud secara maksimal, jika diikuti dengan diberikannya berbagai sumber penerimaan yang sesuai untuk daerah. Pemberian tersebut harus merujuk kepada Undang-Undang yang mengatur tentang tata kelola keuangan.

Sesuai yang telah tertulis di PP No. 12 Tahun 2019, keuangan daerah didefinisikan setiap hak serta kewajiban daerah yang bisa dinilai menggunakan dana untuk keperluan pelaksanaan suatu pemerintahan daerah, juga semua wujud aset yang bisa dibuat menjadi kepemilikan daerahnya berdasarkan hak serta kewajiban pada tempat tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah merupakan semua bentuk aktivitas yang berkaitan dengan mengelola keuangan melingkupi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.¹⁶

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.”

Inti dikelolanya keuangan daerah ialah sebagai peningkatan ketepatan serta daya guna terhadap hal mengelola sumber daya keuangan daerah. Selain itu juga kesejahteraan daerah bisa ditingkatkan dan memaksimalkan layanan untuk masyarakat. Kewajiban pendapatan asli daerah pada keuangan daerah dijadikan satu dari sekian tolak ukur yang paling penting dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin besar perolehan pendapatan daerah maka semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang bisa dipakai untuk memelihara penyelenggaraan otonomi daerah.

Terdapat beberapa poin penting dalam revisi aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam PP 12 Tahun 2019, yakni¹⁷:

1. Hak untuk memungut pajak daerah
2. Kewajiban daerah guna mengerjakan Urusan Pemerintahan Daerah serta melunasi tagihan pihak ketiga,
3. Penerimaan daerah,
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah sendiri yang dikelola ataupun dikelola oleh pihak lain dalam wujud uang, surat berharga, piutang, barang, juga hak lain yang bisa diukur dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan,
6. Kekayaan pihaklain yang dipegang pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tujuan pemerintah atau untuk kepentingan bersama.

Dengan diciptakannya sistem otonomi, setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah harus mampu mengelola keuangan dengan bijak. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai pada aturan yang telah disahkan dengan tertib, praktis, baik, menjunjung transparansi, ekonomi, serta bertanggung jawab. Asas untuk mengelola keuangan daerah antara lain patut, adil, serta bermanfaat bagi masyarakat.¹⁸ Jika *Good Corporate Governance* dalam mengelola keuangan daerah dapat diimplementasikan, hal itu bisa mewujudkan tranparansi serta akntabilitas pada pelaporan keuangan.

Keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah khususnya hubungan relasi pemerintah dengan rakyatnya, yang kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Dalam pandangan Islam, sebenarnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik tidak hanya berlaku di dunia saja, tetapi lebih jauh akan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Saverius Dhuri Mbipi et al., "Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah" 3, no. 2 (2020): 152–158. Hal. 153

dipertanggungjawabkan diakhirat kelak, karena peran manusia sebagai khalifah di bumi. Sehingga para pemangku kebijakan, pemegang wewenang harus benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil karena hal tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak.

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah resmi, laporan tersebut harus menggambarkan setiap anggaran yang dibelanjakan dengan benar sehingga penggunaannya tidak disalahgunakan.

Bait al-Mal adalah konsep dibidang keuangan negara yang dikenalkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* pada abad tujuh silam, yaitu semua hasil yang didapatkan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan pos-pos yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁹ *Bait al-Mal* dalam mengelola keuangan publik memiliki dua peran utama yaitu mengoptimalkan sumber-sumber keuangan negara. Sumber-sumber keuangan negara Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:²⁰

1) Harta milik umum;

Harta milik umum artinya milik seluruh rakyat seperti sumber daya alam meliputi air, tanah, api dan tambang. Artinya kekayaan itu tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu dan harus dikuasai oleh negara. Seperti yang disampaikan oleh Imam ss San'ani dalam kitab *Subulus as-Salam*

عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْأُكْلِ وَالنَّارِ وَتُؤْمَنُهُ حَرَامٌ.

Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah bersabda, orang muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api dan memperjualbelikannya haram (HR Ibnu Majah).

Hadist ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya seseorang dalam menguasai salah satu diantara ketiga hal. Harta milik umum diharapkan menjadi sumber keuangan negara yang dapat dieprgunakan untuk menyejahterahkan rakyat dan membiayai keperluan negara.

2) Harta milik negara;

Harta milik negara yaitu berupa *fa'i* dan *ghanimah* atau instrumen pajak. Melalui *bait al-mal*, harta dari sumber ini dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kondisi lahan pertanian baik lahan *usyr* atau *kharajiah*. Al Mawardi menegaskan jika tanah *kharaj* tidak menghasilkan atau

¹⁹ Zulkadri, "Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As- Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah," *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* 1, no. 2 (2018): 231–244. Hal. 233

²⁰ Ibid. Hal. 233-234

berkurang karena buruknya saluran air, maka tidak dikenakan kewajiban membayar *kharaj*.

3) Harta milik pribadi;

Zakat merupakan pendapatan negara yang berasal dari pribadi masyarakat. Pemerintah melalui badan *bait al-mal* harus berupaya menyejahterahkan masyarakat dengan memberikan subsidi atau bantuan atau memberikan modal usaha sehingga mustahik menjadi muzakki.

Dari penjelasan diatas, dikatakan bahwa *bait al-mal* mengelola keuangan negara sebagai alat untuk mengalihkan pendapatan melalui subsidi atau pembelanjaan publik. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman atau petunjuk bagi kehidupan umat manusia, yang didalamnya terkandung berbagai perintah, larangan juga anjuran, yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, melainkan juga tentang perekonomian. Yang dimana didalam Al-Qur'an kita dianjurkan untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan. Pemerintah yang mengetahui tentang semua fakta transaksi yang terjadi harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam hal kebaikan merupakan suatu ibadah, sedangkan apabila bersaksi dalam keplalsuan akan termasuk dosa yang besar.

Allah SWT mengetahui segala yang ada di dunia ini termasuk hal sekecil apapun, oleh karena itu manusia diwajibkan untuk menampilkan fakta yang ada bila diminta kesaksian. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan mengenai pentingnya melakukan pencatatan agar dapat mengetahui ketentuan Islam terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam melakukan pencatatan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..” (QS. Al-Baqarah 2 : 282).²¹

2.1.3 Kualitas informasi keuangan

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah diharuskan menyusun laporan keuangan yang berkualitas, hal ini merepresentasikan taatnya mengelola keuangan pemerintahan daerah, melingkupi tertibnya tata kelola serta tundukt pada legalitas. Itu sebabnya laporan keuangan pemerintah harus mencakup informasi yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaporan keuangan dengan kualitas baik nantinya akan dinilai dari auditor pemerintah atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam bentuk opini. Dalam melakukan audit, BPK memberi empat pendapat, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberikan opini.²² Apabila suatu pemerintahan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam informasi keuangan pemerintahan daerahnya, hal tersebut menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah yang terkait sudah memenuhi syarat atau telah diberikan serta pengungkapannya dilakukan dengan relevan, andal, bisa disaingkan juga bisa dimengerti.²³

Kesimpulan dari hasil yang diaudit oleh BPK semester I tahun 2021, BPK menyelidiki 541 (99%) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 dari 542 pemerintahan daerah yang diwajibkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020. Hasil penyelidikan BPK tersebut mengungkapkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan total 486 (90%) laporan, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan total 49 laporan (9%), opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dengan total 4 (0,7%) laporan, dan opini Tidak Wajar (TW) dengan total 2 (0,3%) laporan. Pada lima tahun terakhir, Opini WTP yang diberikan BPK pada pemerintah daerah mendapati kemajuan, dari awalnya 70% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2020. Terjadinya kenaikan tersebut dikarenakan pemernintah daerah telah dilakukannya pembedulan pada *problem* yang terjadi pada tahun sebelumnya, hal tersebut berdampak pada beberapa akun di dalam pelaporan keuangan yang sudah ditampilkan dan disingkap sesuai

²¹ Al Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.S. Al-Baqarah (2): 282., <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>

²² Silvia Almar'atus Sholohah, Ardiani Ika Sulistyawati, and Aprih Santoso, "Kualitas Laporan Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Indonesia Accounting Journal* 1, no. 2 (2019): 45. Hal. 45

²³ Ibid. Hal. 45

dengan standar. Selain peningkatan pada opini WTP, sebanyak 55 LKPD yang mendapat opini selain WTP, dikarenakan adanya akun terhadap pelaporan keuangan yang ditampilkan tidak sesuai SAP juga mungkin belum adanya bukti yang lengkap.²⁴

Apabila informasi keuangan ingin dipercaya, hendaklah memilih penguji yang independen (akuntan publik), sehingga auditor sebagai *at-test function* harus bersikap adil, independen dan obyektif sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهَمَّآ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisaa’ 4: 135).²⁵

Sebagaimana yang telah dikutip di atas, Allah SWT memerintahkan kita, sebagai makhluk ciptaan-Nya yang memiliki akal agar menegakkan keadilan dan tidak bergeming dari keadilan tersebut barang sedikitpun. Sebab kebenaran merupakan hal penting yang tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya.

Dengan dibuatnya sebuah laporan keuangan yang berkualitas hal tersebut akan memberikan sebuah kontribusi yang penting terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Selain akuntabilitas, transparansi juga akan terwujud apabila pemerintah menerapkan SAP pada informasi keuangan untuk mengambil sebuah keputusan.²⁶

²⁴ IHPS I Tahun 2021, dalam <https://www/bpk.go.id/ihps>, Diakses pada 11 Maret 2021 pukul 17.00 WIB

²⁵ Al Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.S. An-Nisaa' (4): 135., <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/135>

²⁶ Lilis Setyowati et al., “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN,” no. 1 (n.d.): 179–192. Hal. 181-182

Adapun empat kategori yang dibutuhkan supaya pelaporan keuangan pemerintahan memiliki kualitas:²⁷

a. Relevan

Yaitu apabila suatu laporan keuangan mengandung informasi yang bisa berpengaruh pada pengambilan kesimpulan dengan memberi bantuan kepada pengguna memeriksa kejadian masa lampau atau masa sekarang, dan meramalkan masa mendatang, juga merevisi simpulan pemeriksaan mereka dimasa lampau.

b. Andal

Dapat dikatakan andal apabila memuat informasi yang terhindar atau bebas dari kekeliruan, ditampilkan apa adanya, jujur serta wajar, namun apabila penyajian laporan keuangannya tidak dapat diandalkan kemungkinan informasi tersebut menyimpang.

c. Dapat dibandingkan

Untuk melakukan sebuah pelaporan keuangan, informasi yang dimuat akan lebih bermanfaat apabila bisa dibandingkan dengan tahun lalu maupun dengan hasil pelaporan keuangan dari entitas yang lain apabila menggunakan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Laporan keuangan yang berkualitas haruslah mudah dipahami semua pemakai, juga menggunakan titel yang dapat dipahami pula.

2.1.4 Aksesibilitas laporan keuangan

Pada dasarnya terdapat syarat utama dalam mewujudkan *Good Governance*, yaitu: akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* ini adalah aksesibilitas laporan keuangan.²⁸ Aksesibilitas dapat disimpulkan sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintahan daerah secara umum serta jujur dalam bentuk pelaporan keuangan yang mudah dijelajahi oleh *stakeholder*.²⁹

Ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk membuat laporan keuangan, bukan hanya dikarenakan pelaporan tahunan yang

²⁷ Goenawan GOENAWAN, Bhakti S. Sastranegara, and Syamsu Rizal, "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus Pada Pemda Kota Bandar Lampung)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (2012). Hal. 1-2

²⁸ Mirta Wijaya, Neri Susanti, and Sulisti Afriani, "Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2017): 141–150. Hal. 141

²⁹ Nur Azizah, Junaidi -, and Achdiar Redy Setiawan, "Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Journal of Research and Applications: Accounting and Management* 1, no. 2 (2015): 111. Hal. 112

tidak relevan yang pengguna butuhkan, bisa saja karena laporan tersebut belum ada dan sulit di akses untuk *stakeholder*.³⁰ Dengan adanya sistem aksesibilitas, pengguna mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi keuangan.³¹ Laporan keuangan tidak akan berkualitas apabila disajikan tidak lengkap dan sulit untuk diakses.³²

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Dengan diciptakannya pengendalian intern secara menyeluruh tidak hanya di pemerintahan pusat tapi juga pemerintahan daerah, hal ini akan mempersempit kemungkinan penyalahgunaan penggunaan laporan keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, pengendalian intern juga berfungsi untuk sarana pembahasan terhadap sisa pendapatan dengan belanja daerah untuk mencegah tindakan penyimpangan di masa yang akan datang. Pengendalian internal dilakukan dengan harapan supaya dalam melakukan pengendalian intern dapat memaksimalkan kinerja dalam membuat pelaporan keuangan yang lebih akuntabel.³³

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah pengendalian seluruh kegiatan yang dilakukan dengan cara berkesinambungan atas pemimpin dan semua karyawan demi terwujudnya impian suatu kelompok melalui hal yang baik juga praktis, kehandalan dalam membuat informasi keuangan, mengamankan aset negara, juga taat pada aturan yang berlaku.³⁴ Peraturan tersebut merupakan satu langkah konkrit untuk membentuk suatu pengawasan melalui sebuah sistem. Sistem akan dengan sendirinya melakukan pengawasan kepada pemerintah dengan tujuan untuk mencapai apa yang telah dituliskan dalam pembukaan UUD 1945.³⁵ SPIP

³⁰ Superdi, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)," *JOMFekom* 4, no. 1 (2017): 205–2019. Hal. 2016

³¹ Wijaya, Susanti, and Afriani, "Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara." Hal. 141

³² Superdi, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)." Hal. 2016

³³ Zeny Antika, Yunika Murdayanti, and Hafifah Nasution, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Wahana Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 212–232. Hal. 214

³⁴ Dominikus Ledo and Sri Ayem, "Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah," *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 25, no. 2 (2017): 161–175. Hal. 164

³⁵ Sukma Selvianny Tolley, Ridwan, and Muh Yunus Kasim, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Kabupaten Sigi," *Magister Pascasarjana Universitas Tadulako* (2017): Hal.179-190. Hal. 180

diadopsi dari *COSO Internal Control Framework* dengan melakukan beberapa penyesuaian karakteristik dan keperluan pemerintah di Indonesia. Selain telah dipraktikkan dilingkungan pemerintah diberbagai negara, SPIP termuat oleh beberapa bagian, yakni pengendalian lingkungan, risiko penilaian, kegiatan pengendalian, informasi juga komunikasi, dan yang terakhir adalah peninjauan. Kelima bagian tersebut sama-sama akan memiliki pengaruh serta sinergi.³⁶ Di dalam prosesnya pengendalian akan menyatu dan bercampur dengan tingkah laku serta pekerjaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan serta bawahannya, hal tersebut merupakan pondasi terpenting dari pengendalian intern. Sebagai kepala pemerintahan baik gubernur, walikota maupun bupati wajib melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan secara umum, dengan begitu pemerintahan yang bersih akan terwujud.³⁷

Sistem pengendalian internal pemerintah dalam pelaporan keuangan yakni cara nan dirancang demi memberikan kepercayaan yang memuaskan terhadap pelaporan keuangan yang handal yang memenuhi standar yang berlaku dengan tujuan memaksimalkan performa, transparan serta akuntabel dalam mengelola keuangan negara.³⁸ Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas akan terwujud apabila menerapkan kontrol internal yang bagus. Kontrol internal akan meningkat tergantung pada baik atau buruknya *Good Government Governance* (GGG), terlihat dari informasi penampilan pemerintah yang disematkan didalam pelaporan keuangan pemerintah yang bertanggung jawab, dan nantinya akan dicek oleh BPK disertai dengan pemberian pendapat audit BPK.³⁹ Saat *internal control system* yang dipaparkan dalam SPIP berjalan, hal itu secara tidak langsung berlaku tujuan pengontrolan, jadi tiap pegawai lembaga pemerintahan suka tidak suka bekerja “dibawah kontrol”. Lalu jika mempertahankan keadaan tersebut akan tercipta

³⁶ Nuryani Tadeko, “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai)” (n.d.): 104–115. Hal. 105

³⁷ Ni Made Sudiarianti, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Penelitian mandiri* 4, no. 71 (2015): 1–25. Hal. 2-3

³⁸ Sigit Prabawa, Herman Karamoy, and Lidia Mawikere, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa),” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 269. Hal. 269

³⁹ Zeny Antika, Yunika Murdayanti, and Hafifah Nasution, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” Hal. 214

internal control culture yang berarti sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi dipemerintahan Indonesia.⁴⁰

Satu dari banyaknya struktur pengendalian intern yakni kegiatan mengawasi yang dihadapkan dengan penilaian berkala dari kualitas penampilan atau prestasi pengendalian internal dari manajemen guna memilih bahwa pengendalian sudah mulai dioperasikan sesuai harapan juga akan dimodifikasi selaras dengan perubahan dalam tiap kondisi.⁴¹ Dalam bagian pengendalian intern lainnya, ada wujud dari kegiatan pengontrolan yakni penguraian tugas yang bertujuan meminimalkan masalah kekeliruan juga upaya menutupi kekeliruan ataupun penyimpangan tugas oleh orang yang berkaitan dalam memengaruhi hasil dari kualitas informasi keuangan.⁴²

2.1.6 Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

mengelola keuangan yang mengedepankan sikap transparansi merupakan permintaan para *stakeholder* baik dipusat ataupun didaerah guna menciptakan masyarakat yang sejahterah, kepala daerah maupun presiden telah memohon untuk diberikan amanah dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah pada masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu). Oleh sebabnya, transparansi mengelola keuangan merupakan suatu tuntutan mutlak untuk siapapun yang mengelola keuangan negara ataupun daerah.

Satu dari sekian banyaknya permasalahan terbesar dalam mengelola keuangan suatu Negara yaitu korupsi. Telah dirilis data indeks persepsi korupsi oleh *Transparency International* (TI) untuk tahun 2020. Pada isi laporan terkait, Indonesia menduduki posisi ke-102 dari 180 negara didunia dengan skor CPI sebesar 37 dengan rentang 0-100, skor 0 dipersepsikan sangat korup, sementara negara dikatakan bersih dari korupsi apabila mencapai skor 100.⁴³ Peringkat tersebut turun dari sebelumnya berada di urutan ke-85 dengan skor 40 pada tahun 2019.⁴⁴ CPI sendiri mengilustrasikan citra korupsi atas penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan keperluan pribadi yang melingkupi bidang publik, administrasi pemerintahan, serta politik. Dengan mengoptimalkan transparansi pada pengelolaan keuangan, hal tersebut setidaknya akan mencegah terjadinya

⁴⁰ Tolley, Ridwan, and Kasim, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Kabupaten Sigi." Hal. 180

⁴¹ Gerry Armando, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah," *Jurnal Universitas Negeri Padang* (2013): Hal.27.

⁴² Ibid. Hal. 5

⁴³ Transparency International, *Corruption Perceptions*, 2018, <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>. Hal. 2

⁴⁴ Ibid. Hal. 2

perilaku korupsi. Inilah mengapa sistem transparansi ke publik sangat diperlukan dalam *Good Governance*, bahkan merupakan syarat penting.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Pemerintah dituntut agar mampu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga nantinya dapat dimengerti oleh masyarakat maupun pihak yang membutuhkan.⁴⁵

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas akan mewujudkan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, yaitu sebagai tanggung jawab dari perseorangan maupun yang diberi kuasa untuk menggarap beberapa sumber daya publik juga yang terkait bisa merespon serta memberikan transparansi untuk segala hal yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban fiskal, manajerial, juga program dalam pengelolaan pemerintahan daerah khususnya dalam mengelola APBD.

Transparansi juga akuntabilitas memiliki ketertarikan satu sama lain. United Nation Development Program mengungkapkan bahwa jika tidak ada transparansi akuntabilitas tak akan tercipta, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tak berarti. Akuntabilitas saling berkaitan dengan instrumen guna aktivitas pengendalian lebih-lebih pada permasalahan perolehan hasil dalam melayani masyarakat juga penyampaian secara terbuka pada masyarakat karena akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui pengaksesan informasi juga keterbukaan.

Dalam praktiknya, transparansi pernah dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As Sidiq, sebagaimana yang telah diriwayatkan sebagai berikut:⁴⁶

“Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar As Sidiq sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khilafah setelah diriku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami mengirimkan kembali kedua hamba sahaya kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga Allah SWT merahmati Abu Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat.”

Dari cerita yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW sekaligus anak perempuan dari Abu Bakar As Sidiq tersebut ialah bahwa seorang pemimpin harusnya membangun suatu transparansi dalam bermuamalah dan dijelaskan

⁴⁵ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “PERWUJUDAN Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah Suryo Pratolo” 9, no. 2 (2008): 108–124. Hal. 111

⁴⁶ Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284,” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 15–35. Hal. 22

harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan harta miliknya dengan harta untuk daerahnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut kesimpulan dari peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini bisa di lihat pada tabel berikut ini:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Charlie Andreas Saragih (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun	Penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Secara terpisah maupun bersama, penyajian laporan keuangan daerah juga aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2.	Ika Arifanny Subekti, Fahmi Rizani dan Rifqi Novriyandana (2015)	Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Persepsi Pengguna Eksternal Laporan Keuangan Kota	Kualitas penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kota Banjarmasin (Y)	Secara terpisah maupun simultan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap

		Banjarmasin)		akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kota Banjarmasin.
3.	Mirza Masyhur (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai	Penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), pengendalian internal (X3), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Secara terpisah maupun simultan, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internl memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
4.	Nabila Ayu Indira (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah	Pada penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

			(Y)	keuangan daerah. Sedangkan pada aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan dalam mengakses laporan keuangan pemerintahan daerah.
5.	Siti Kemala Sari Tambunan (2018)	Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Medan	Kualitas informasi keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y)	Secara simultan, kualitas laporan informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

				Sedangkan secara parsial, aksesibilitas juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
6.	Superdi (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)	Penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas (X2), sistem akuntansi keuangan daerah (X3), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Secara terpisah maupun simultan, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
7.	Maris Magdalena Hesti Kurniawati (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)	Penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2), sistem akuntansi keuangan daerah (X3), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Secara terpisah maupun bersama-sama, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi akuntabilitas

				pengelolaan keuangan daerah
8.	Embun Widya Sari (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Gaya kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu	Sistem pengendalian intern (XI), penyajian laporan keuangan (X2), aksesibilitas laporan keuangan (X3), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	Secara terpisah maupun bersama-sama, sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
9.	Rahmad Bintang Shabri Asroel	Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau	Akuntabilitas (X1), Ketidakpastian Lingkungan (X2), Komitmen Pimpinan (X3), Pengendalian Internal (X4), Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)	Secara terpisah maupun bersama-sama, akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, komitmen pimpinan dan pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Kualitas informasi keuangan merupakan suatu catatan informasi yang menyediakan informasi yang vital atau utama dan tepat waktu untuk melengkapi kepentingan bagi pengguna untuk mengambil kesimpulan. Laporan keuangan yang mudah dipahami, dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk mengambil sebuah kesimpulan, bersih bebas dari informasi yang menyimpang dan kesalahan material, juga bisa diandalkan merupakan hal yang paling penting apabila ingin membuat informasi keuangan yang memiliki kualitas.

Transparansi serta akuntabilitas akan tercipta tergantung dengan seberapa berkualitasnya penyajian suatu laporan keuangan. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharuskan dapat merancang informasi keuangan yang sinkron dengan standar yang telah disahkan. Penyampaian laporan keuangan yang berkualitas akan memebritahukan perihal segala peristiwa yang terjadi didalam suatu lembaga hingga hak ini merupakan suatu wujud transparansi lembaga yang bersangkutan. Penyampaian laporan keuangan yang berkualitas tersebut bakal meweujudkan akuntabilitas publik dikarenakan hal ini mencerminkan kinerja pemerintah yang sebenarnya dari suatu lembaga sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kemala Sari Tambunan (2018) tentang pengaruh kualitas informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki kesimpulan bahwa kualitas informasi keuangn serta aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif mengenai transparansi pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan. Ini membuktikan jika makin berkualitasnya laporan keuangan maka semakin tinggi transparansi yang dilakukan pemerintah. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka asumsi pertama yang dibangun yakni:

H1 : Kualitas informasi keuangan daerah berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan daerah

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah diharuskan mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus

menyodorkan keringanan dalam mengakses informasi keuangan untuk *stakeholder* supaya tercipta pemerintahan yang transparan untuk urusan informasi keuangan. Sehingga demi menyokong transparansi dan akuntabilitas yang baik, pemerintah bisa memakai semua sarana guna menyampaikan laporan keuangannya dengan memakai mimbar yang bisa menyumbang atensi langsung untuk menumbuhkan transparansi juga akuntabilitas pemerintah bagi *stakeholder*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Charlie Andreas Saragih (2015) dan Mirza Masyhur (2017) aksesibilitas laporan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang positif pada transparansi juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai uraian di atas, asumsi kedua yang di bangun yakni:

H2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan daerah

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian intern yakni sebuah sistem dengan tujuan memberi arahan, mengontrol dan menguji sumber daya dalam sebuah entitas, juga mencegah dan mendeteksi apabila terjadi penggelapan. Selain laporan keuangan yang berkualitas dan aksesibel, transparansi dan akuntabilitas juga akan terwujud apabila setiap entitas bisa mewujudkan, mengelola juga merawat sistem pengendalian internal yang baik secara berkala, hingga bisa meletakkan rasa percaya kepada masyarakat berkat terwujudnya misi lembaga dengan baik dan praktis, laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara serta patuh pada aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan penelitian Embun Widya Sari (2017), sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai uraian di atas, asumsi ketiga yang yakni:

H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan daerah

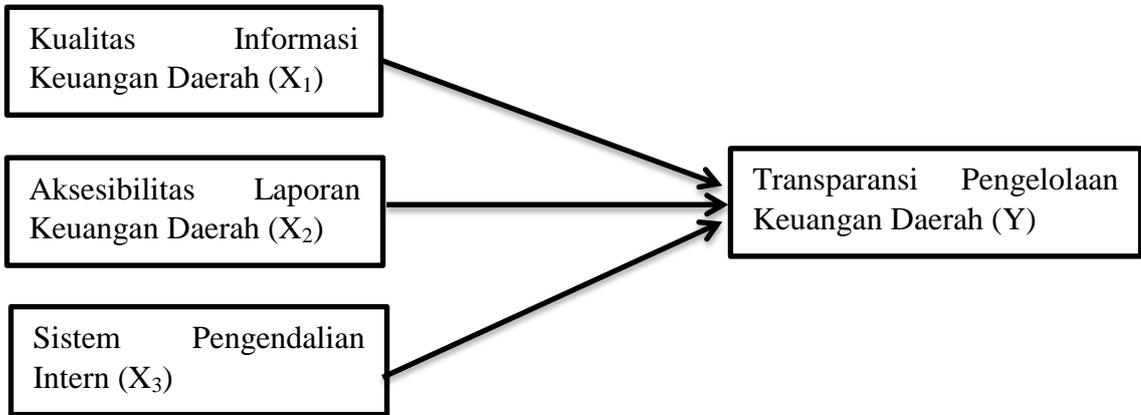
2.4 Kerangka Berpikir

Dari semua simpulan di atas, maka terciptalah kerangka berpikir untuk penelitian ini. Pada sub bab ini dijabarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini melingkupi kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern. Sementara itu variabel terikat pada penelitian ini mencakup transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Implikasi antar variabel digambarkan pada skema berikut:

(variabel bebas)

(variabel terikat)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis pada apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasi data untuk dapat digeneralisasikan.⁴⁷

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian pengumpulan data yang di ukur dengan teknik analisis statistik. Tujuan dilakukannya penelitian adalah mengetahui serta memastikan hubungan antara kualitas informasi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern yang dimana pada penelitian ini sebagai variabel bebas, pada transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel terikat.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer serta data sekunder. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) seperti yang diperjelas oleh Vina Herviani dan Angky Febriansyah maka data primer merupakan suatu pengumpulan data dari pihak pertama, biasanya didapat melalui wawancara, jejak digital dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2012) ialah data yang dihasilkan dari beberapa referensi seperti buku, jurnal maupun yang lainnya.⁴⁸

Kesimpulan dari penelitian yaitu data primer adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari pihak pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga.

3.2.2 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi atas data primer serta data sekunder. Data priimer dari penelitian ini dihasilkan dari penyebaran kuesioner yang bakal disebarkan segera untuk pegawai bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Demak. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini dihasilkan dari jurnal-jurnal, penelitian sebelumnya, beberapa data yang berkesinambungan

⁴⁷ Toto and Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2012. hlm. 18

⁴⁸ Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2017). hlm. 23

dengan penelitian seperti laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016-2021, data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) tahun 2021 semester I.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yakni keseluruhan pada obyek yang akan diteliti dengan ketentuan tertentu yang akan dilakukan penelitian.⁴⁹ Jadi populasi merupakan suatu obyek dalam penelitian dan berkaitan dengan sampel. Populasi yang digunakan yakni staf bagian keuangan di SKPD Kabupaten Demak. Untuk pemilihan staf bagian keuangan sebagai populasi pada penelitian ini dikarenakan peneliti percaya pegawai bagian memahami seluk beluk tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut.

3.3.2 Sampel

Sampel yakni bagian terkecil dari jumlah populasi yang mempunyai ketentuan tertentu.⁵⁰ Sampel pada dalam penelitian ini sebanyak 65 pegawai bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Demak. Mengenai pertimbangan pada penelitian ini yaitu menurut kecakapan responden untuk memberitahukan informasi yang diinginkan. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah responden yang ikut mengelola keuangan, paham akan penerapan SAP untuk membuat pelaporan keuangan, paham akan SAK Daerah, juga sudah mengabdikan dalam bidangnya lebih dari setahun. Metode yang dipakai dalam mengambil sampel pada penelitian ini yaitu metode *purposive sampling* dimana sampel yang dipilih sengaja sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kuesioner serta dokumentasi:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode penelitian dengan memperoleh data yang berkaitan dari sumber pertama (data pertama). Peneliti memperoleh data dengan cara memberikan kuesioner atau angket secara langsung ataupun dari perantara pada yang staf yang berkaitan.
2. Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu metode penelitian dengan mendapatkan data yang terkait dengan penelitian dari beberapa jurnal, situs web, buku-buku, serta hal lainnya yang berhubungan juga menyokong penelitian ini.

⁴⁹ Supardi Supardi, "Populasi Dan Sampel Penelitian," *Unisia* 13, no. 17 (1993): 100–108. hlm. 101

⁵⁰ M.Hum. Marsudi, S. Kar., *Metodologi Penelitian, Hand Out*, 2014.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yaitu sebuah bahan penelitian, fenomena ataupun konsep yang mengandung beragam nilai, entah itu dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu dan standar yang lain.⁵¹ Variabel juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa divariasikan atau diragamkan. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini terbagi atas 2 variabel, yakni variabel terikat serta variabel bebas. Pengertian operasional variabel sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.⁵² Variabel terikat umumnya digambarkan huruf Y. Variabel terikat dipenelitian ini yakni transparansi pengelolaan keuangan daerah.

3.5.2 Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang dijadikan penyebab ataupun mempunyai kemungkinan “teoritis” terdampak pada variabel lain.⁵³ Variabel bebas biasanya diberi lambang huruf X. Variabel bebas pada penelitian ini yakni kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern.

3.6 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Berikut tabel penjelas terkait variabel pada penelitian ini:

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator Pengukuran Variabel	Skala Pengukuran
Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan daerah yaitu kesimpulan dari seluruh kegiatan akuntansi suatu entitas pelaporan yang berisi Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, neraca, laporan	<ul style="list-style-type: none">• Relevan• Andal• Dapat Dibandingkan• Dapat Dipahami	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert

⁵¹ Nfn Purwanto, “Variabel Dalam Penelitian Pendidikan,” *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215. hlm. 342

⁵² J. Andriani H Hardani. Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017. hlm. 305

⁵³ Ibid. hlm. 306

	operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya menyampaikan sebuah informasi keuangan yang bisa dimengerti pengguna juga bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan di masa mendatang.		
		(PP Nomor 71 Tahun 2010)	
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Aksesibilitas laporan keuangan ialah bentuk sarana dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada publik secara terbuka agar mengetahui maupun mendapatkan informasi keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi media masa • Kemudahan akses laporan keuangan <p>(Siti Kemala Sari Tambunan: 2018)</p>	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert
Sistem Pengendalian Intern	Suatu upaya guna membimbing, memonitor, serta menguji sumber daya sebuah organisasi, juga sangat berperan untuk mencegah dan mendeteksi penyelewengan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi dan akurasi data yang tersimpan • Tepat waktu dalam menginput data • Prosedur otorisasi 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert

		<p>dokumen transaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersimpannya dokumen sumber data • Implementasi kebijakan dan standar <p>(Embun Widya Sari 2017)</p>	
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi pengelolaan keuangan merupakan keterbukaan suatu entitas dalam menyajikan laporan keuangan untuk para <i>stakeholder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi yang benar tentang tanggung jawab • Penyusunan sebuah sistem pengaduan <p>(Nabila Ayu Indria: 2018)</p>	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan informasi dengan tujuan untuk menganalisa data melalui penguraian apa adanya berbagai data yang disatukan tanpa berniat mengambil ketentuan yang diberlakukan untuk general.⁵⁴ Analisis ini hanya berupa pengumpulan data dasar dengan wujud deskripsi saja, dengan kata lain tidak menggali atau menjelaskan keterkaitan suatu hubungan, pengujian hipotesa, pembuatan prediksi, ataupun mencoba menarik simpulan.

Statistik deskriptif diperlukan dengan tujuan guna menganalisa pandangan responden perihal pengaruh kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Tanggapan responden akan diberikan angka 5 point dengan menggunakan skala likert yaitu : 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

⁵⁴ Clara Yosani, "Teknik Analisis Kuantitatif," *Makalah Teknik Analisis II* (2006): 1–7, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas ialah suatu indikator yang menentukan sampai mana alat ukur yang dipakai untuk menguji sehingga dapat disimpulkan valid, begitupun dengan kuesioner yang digunakan sebagai alat uji wajib dapat menguji apa yang akan diukur. sehingga pada penelitian ini, uji validitas digunakan dengan supaya mengetahui valid atau tidak suatu kuesioner. Validnya suatu kuesioner bisa dilihat dari nilai korelasi yang positif, dan nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] kurang dari taraf signifikan (α) 0,05.⁵⁵ Suatu penelitian memerlukan uji validitas karena dapat mengukur serta menggali fakta yang tidak diketahui.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu indikator yang membuktikan seberapa konsisten hasil pengukuran apabila dilakukan pengujian dengan memakai obyek yang sama bisa menciptakan data yang sama. Reliabelnya sebuah kuesioner tergantung pada konsistensi ataupun stabilnya jawaban responden dari masa ke masa. Demikian juga kuesioner yang digunakan untuk alat uji harus memiliki reliabilitas yang tinggi. Perhitungan reliabilitas bergantung pada hasil dari valid atau tidaknya kuesioner. Oleh sebab itu, harus menghitung validitas dahulu sebelum menghitung reliabilitas, jadi apabila hasil kuesioner lebih banyak yang tidak valid maka tidak dapat melanjutkan untuk ketahap uji reliabilitas.⁵⁶

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ialah suatu syarat statistika yang wajib terpenuhi sebelum melakukan analisa pada data yang sudah terkumpul. Adapun pengujian yang digunakan pada uji asumsi klasik yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan guna menilai penyebaran data pada suatu kelompok apakah telah tersebar secara normal atau tidak. Menurut Priyatno, Data dinyatakan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05.⁵⁷ Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ghazali, yang mengatakan bahwa normal atau tidaknya suatu kuesioner tergantung pada hasil uji normalitasnya yang berfokus pada nilai *Asimp.Sig* (2-tailed), apabila variabel residual nilainya lebih dari 0,05%

⁵⁵ Ristya E Widi, "Uji Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Epidemiologi Kedokteran Gigi," *Stomatognathic (J.K.G. Unej)* 8, no. 1 (2011): 27–34. hlm. 27-28

⁵⁶ Ibid. hlm. 31

⁵⁷ Rezeki Amaliah, "Hasil Belajar Biologi Materi Sistem Gerak Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) Pada Siswa Kelas XI SMAN 4 Bantimurung," *Jurnal Dinamika* 8, no. 1 (2016): 11–17, <https://ejournal.umm.ac.id>. hlm. 14

atau 5% dan apabila nilai *Asimp.Sig* (2-tailed) bernilai dibawah 0,05% atau 5% sudah pasti uji normalitas tidak bisa terpenuhi pada data tersebut.⁵⁸

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yaitu alat uji model regresi yang bertujuan guna mengidentifikasi terjadinya hubungan antar variabel bebas. Apabila tidak timbul korelasi antara variabel bebas maka model regresi bisa disimpulkan bagus. Uji tersebut bisa dilaksanakan menggunakan uji regresi, dengan nilai skala VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*, dengna syarat sebagai berikut:⁵⁹

1. Dikatakan telah terjadi multikolinieritas jika nilai VIF berada dikisaran angka 1-10.
2. Sedangkan apabila nilai *tolerance* lebih dari 0.10, maka disimpulkan tidak adanya masalah multikolinieritas.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu alat uji yang dipakai guna menelisik ada atau tidaknya ketidakserasian varian pada residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Model regresi yang bagus adalah jika nilai residu pada tiap nilai prediksi bervariasi dan cenderung konstan atau biasa disebut homokedastisitas, tidak timbul gejala heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas signifikansinya melebihi tingkat kepercayaan 0,05 akan bisa ditarik kesimpulan model regresi tidak memiliki atau terjadi heteroskedastisitas⁶⁰.

3.7.4 Uji Ketepatan Model

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan digunakannya koefisien determinasi dalam penelitian yaitu menggambarkan berapa banyak variasi variabel dependen yang dijelaskan dalam model. Koefisien determinasi dihasilkan dari mengkuadratkan koefisien korelasi lalu dikalikan 100%. Persentase itu menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.⁶¹ Koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh data bebas dapat menjelaskan data terikat. R square bernilai antara 0 – 1 dengan syarat apabila mulai mendekati angka satu itu artinya semakin baik atau

⁵⁸ Lu'lu UI Maknunah & Kadela Reka Nur Laili., "Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Geti Kuda Terbang (Studi Kasus Di UD. Bu Sulasmi Kademangan)," *Jurnal Translitera* 8, no. 2 (2019): 34–43, <https://doi.org/10.35457/translitera.v8i02.890>. hlm. 38

⁵⁹ E. Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22, Lab Kom Manajemen Fe Ubb*, 2016. hlm. 47

⁶⁰ Ibid. hlm. 49

⁶¹ Vicka Stawati, "Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH PROFITABILITAS , LEVERAGE DAN UKURAN," *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi* 6, no. November (2020): 147–157. hlm. 151

variabel bebas nyaris mencakup seluruh informasi yang diperlukan telah diberikan untuk menaksir variasi variabel terikat.⁶²

b. Uji Simultan (Uji Statistik f)

Uji simultan atau dikenal dengan uji statistik f ialah alat yang bertujuan guna menilai variabel independen apakah memiliki pengaruh secara serempak pada variabel terikat. Pelaksanaan uji F dihitung dengan pertolongan dari sistem SPSS, dengan syarat penilaian berikut:⁶³

- Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ maka H_a diterima.
- Jika nilai probabilitas signifikansi \geq dari $0,05$ maka H_a ditolak.

c. Uji Parsial (Uji t)

Tujuan digunakan uji parsial dalam suatu penelitian guna melihat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan terikat dengan mengacu nilai t pada taraf signifikan 5%. Jika tingkat probabilitas signifikan kurang dari 5% maka hipotesis diterima, hal itu menjelaskan bahwa secara parsial variabel independen mempunyai berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Lalu jika besarnya probabilitas signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak.⁶⁴

3.7.5 Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode uji regresi linier berganda, yaitu model algoritma guna menelusuri pola hubungan antara variabel dependen dengan lebih dari dua variabel independen,⁶⁵ dengan menggunakan rumus berikut ini:⁶⁶

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

⁶² Maulida Zakiya Damayanti, "Penerapan Psak, D A N Sikap, and Amil Terhadap, "(Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)" 1 (2021). Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021, hlm.. 41-42

⁶³ Jihan Suci Lestari, Umi Farida, and Siti Chamidah, "Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan, Dan Lingkungan Kerjaterhadap Prestasi Kerja Guru," *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 38–55. hlm. 44-45

⁶⁴ Jurnal Ilmiah M-progress et al., "Pengaruh Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Staf Umum Bagian Pergudangan Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) Di Tangerang," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 12, no. 1 (2022): 13–25. Hal. 23

⁶⁵ Tesa Nur Padilah and Riza Ibnu Adam, "Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang," *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* 5, no. 2 (2019): 117-128. hlm. 118

⁶⁶ Rika Regina, *Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2019)*, 2020. hlm. 80

Keterangan:

Y : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

X1 : Kualitas Laporan Keuangan

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

X3 : Sistem Pengendalian Intern

α : Konstanta

β_1 - β_3 : Koefisien variabel bebas (independen), jika nilai β adalah (+) maka akan terjadi kenaikan pada variabel terikat (dependen) (Y), sedangkan jika nilai β adalah (-) maka akan terjadi penurunan pada variabel terikat (dependen) (Y)

ε : Kesalahan Baku atau Error

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Kabupaten Demak

Kata “Demak” berakar dari kata bahasa Arab, yaitu Dhima’ yang memiliki arti rawa atau paya. Hal itu merujuk pada tempat itu yaitu tanah bekas rawa atau tanah berlumpur. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hamka, kata Demak berawal dari kata Dama yang dapat diartikan sebagai air, dikarenakan adanya rawa maupun tanah payau sehingga hal tersebut timbul banyaknya tebat (kolam) ataupun sejenis telaga tempat menampung air. Menurut buku dengan judul “The Soil of East Central Java” karya Dames (1955), alkisah dikatakan Demak pada zaman dulu bertempat di tepi laut, lebih spesifiknya berlokasi ditepi utara Jawa Tengah dan pulau Muria yang dipisahkan oleh selat Silugangga. Hal ini menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian, dikarenakan selat tersebut dapat bebas dilalui perahu dari arah Semarang ke Rembang melewati Demak karena mempunyai luas selat yang sangat lebar. Tapi setelah abad XVII selat tersebut tidak dilalui kembali dikarenakan selat tersebut mulai didangkalan⁶⁷

Kabupaten Demak merupakan satu-satunya wilayah Majapahit yang rata-rata masyarakatnya memeluk agama Islam. Dari cerita T tutur, kata “Demak” berawal dari peristiwa Nyi Lembah yang bermula dari Rawa Pening, memiliki lesung yang terdampar di muara sungai Tuntang. Untuk mencari tahu sebab terdamparnya lesungnya tersebut, beliau “demak-demek” (istilah bahasa Jawa yang berarti meraba-raba) didasar sungai. Dari kata tersebut muncul nama Demak. Berkaitan dengan kata “Demak”, kata tersebut sudah sering diucapkan sebagai satu dari 33 pangkalan jalur lalu lintas air pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat kepemimpinan Hayam Wuruk.

Kerajaan Demak awal mulanya adalah suatu daerah yang dikenal dengan nama Gelagahwangi atau biasa disebut Bintoro, yang merupakan salah satu daerah yang dikuasai kerajaan Majapahit, setelah kemunduran kerajaan Majapahit akibatnya banyak daerah kekuasaannya memberontak dan ingin melepaskan diri juga saling menyerang dikarenakan mereka menganggap satu-satunya ahli waris kerajaan Majapahit yang sah. Anak dari Prabu Brawijaya V, raja Majapahit yang terakhir yaitu Raden Patah diberi anjuran dari para Walisongo untuk mulai mendirikan suatu kerajaan yang

⁶⁷ Maryam, “Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699. Hal. 64

dikenal dengan nama kerajaan Demak karena daerah kekuasaannya memiliki lokasi yang strategis. Dari situlah kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam yang pertama di pulau Jawa dan juga mulai memutus hubungan seutuhnya dari kerajaan Majapahit, dan peradaban Islam mulai berkembang dengan pesat.⁶⁸

Pada sekitar tahun 1521 sampai tahun 1546, kerajaan Demak mengalami puncak kejayaannya di bawah penguasaan Sultan Trenggono, dimana pada tahun tersebut agama Islam berkembang pesat akibat dari meluasnya tanah kekuasaan kerajaan Demak sampai ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, hingga Blambangan. Akan tetapi pada tahun 1546 sultan Trenggono tewas terbunuh saat penyerangan di daerah yang telah di kuasai kerajaan Blambangan, yaitu daerah Panarukan, Situbondo.

Hal tersebut memicu perebutan kekuasaan untuk menduduki kursi kerajaan, di mulai dari pangeran Sekar atau yang dikenal sebagai pangeran Surowiyoto yang melakukan berbagai upaya guna memegang kekuasaan dengan melawan sunan Prawata, putra dari sultan Trenggono. Sunan Prawata yang mengetahui rencana licik pangeran Surowiyoto lalu membunuhnya dan menduduki kekuasaan. Tetapi karena adanya peristiwa itu, dukungan terhadap sunan Prawata mengalami penyurutan. Sunan prawata kemudian mengalihkan pusat kekuasaan kerajaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah.

Pada tahun pertama sunan Prawata memegang kekuasaan, tepatnya pada tahun 1547, Arya Penangsang yang tak lain adalah putra dari pangeran Surowiyoto membunuh sunan Prawata untuk membalas dendam. Setelah membunuh Sunan Prawata dan menduduki tahta, Arya Penangsang juga menyingkirkan penguasa Jepara, yaitu pangeran Hadiri atau lebih dikenal dengan sebutan pangeran Kalinyamat, sebab dia menganggap bahwa pangeran Kalinyamat berbahaya bagi kekuasaannya. Lalu pada tahun 1556, raja kerajaan Pajang, yaitu Adipati Hadiwijaya, yang pada awalnya setia pada kerajaan Demak, melakukan pembelotan dengan motif balas dendam karena tewasnya sunan Prawata dan pangeran Kalinyamat yang didalangi Arya Penangsang. Pemberontakan tersebut mengakibatkan hancurnya kerajaan Demak dan menjadi vazal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang.⁶⁹

⁶⁸ Heru Arif Pianto, "Keraton Demak Bintoro Membangun Tradisi Islam Maritim Di Nusantara," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2017): 18–26. Hal. 20

⁶⁹ Ibid. Hal 21-22

4.1.2 Letak Geografis

Kabupaten Demak merupakan satu dari banyaknya kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang terletak pada $6^{\circ}43'26''$ - $7^{\circ}09'43''$ LS dan $110^{\circ}27'58''$ - $110^{\circ}48'47''$ BT dan terletak disekitar 25 km disebelah timur kota Semarang dan di lalui jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Meskipun memiliki kapasitas cekungan air tanah yang lumayan besar yaitu air tanah dangkal sebanyak 166,2 juta m^3 /th serta air tanah dalam sebanyak 4,1 juta m^3 /th, akan tetapi hal tersebut tidak mencukupi syarat guna diubah menjadi air yang bisa diminum. Hal tersebut dikarenakan air tanah di kabupaten Demak terdapat kandungan zat besi yang melebihi batas normal. kabupaten Demak mempunyai wilayah yang luasnya mencapai $\pm 1.149,07$ KM^2 , yang terdiri dari daratan seluas $\pm 897,43$ KM^2 serta lautan seluas $\pm 252,34$ KM^2 juga secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri 249 desa dan 6 kelurahan.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Data Responden

Penelitian ini dilaksanakan dengan memberikan kuesioner bagi staf bagian keuangan di SKPD yang bekerja di wilayah kabupaten Demak. Pada penelitian ini kriteria responden yang dipilih ditentukan dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir juga lama bekerja. Adapun rincian dalam penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut:

Jumlah Kuesioner Yang Dibagikan	Jumlah Kuesioner Yang Dapat Diolah	Jumlah Kuesioner Yang Tidak Dapat Diolah
70	65	5

Adapun alasan tidak dapatnya 5 kuesioner yang tidak dapat diolah adalah karena 3 eksemplar kuesioner tidak kembali kepada peneliti dan 2 eksemplar kuesioner tidak dapat diolah dikarenakan tidak dijawab secara penuh dibagian identitas juga ada poin-poin kuesioner yang memang tidak diisi secara lengkap. Hal itu tentu tidak memenuhi syarat dalam memilih sampel pada penelitian ini. Berikut pengelompokkan berdasarkan syaratnya:

1. Umur Responden

Ciri khas usia responden pada penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan dengan rentang usia 21 hingga lebih dari 50 tahun. berikut hasil pengategorian ciri khas responden menurut usia ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persen
21-25	7	10,80%
26-30	15	23,10%
31-35	10	15,40%
36-40	10	15,40%
>41	23	35,40%
	65	100%

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Sesuai dengan tabel di atas, syarat responden yang didasarkan pada umur responden pegawai bagian keuangan SKPD Kabupaten Demak sebagai sampel pada penelitian ini mengungkapkan responden umur 21 sampai dengan 25 tahun berjumlah 7 responden (10,8%), responden umur 26 sampai dengan 30 tahun berjumlah 15 responden (23,1%), responden umur 31 sampai dengan 35 tahun berjumlah 10 responden (15,4%), responden umur 36 sampai dengan 40 tahun berjumlah 10 responden (15,4%), sedangkan responden dengan umur lebih dari 41 tahun berjumlah 23 responden (35,4%). Kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu responden terbanyak pada penelitian ini berumur diatas 41 tahun.

2. Jenis Kelamin

Ciri khas responden berdasarkan gender dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 golongan yakni pria dan wanita. berikut hasil pengelompokkannya dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Table 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frekuensi	Persen
Pria	27	41,5%
Wanita	38	58,5%
Total	65	100%

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Menurut data diatas, bisa dilihat responden pria pada penelitian ini berjumlah 27 responden dengan persentase 41,5%, jumlah tersebut sedikit lebih kecil jika dibandingkan jumlah responden wanita yang berjumlah 38 responden dengan persentase 58,5%.

3. Pendidikan Terakhir

Karakteristik ini dibagi menjadi lima jenjang yakni SLTA/SMA, D1/D2/D3, D4/S1, dan Pasca Sarjana. Berikut perkiraan pengategorian syarat responden yang mengacu pada tingkat pendidikan terakhir dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Table 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
Diploma	6	9,2%
Pasca	10	15,4%
Sarjana	33	50,8%
SMA	16	24,6%
Total	65	100%

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, menjelaskan bahwa pada tingkat pendidikan terakhir pegawai bagian keuangan SKPD Kabupaten Demak terbanyak yakni S1 berjumlah 33 responden dengan persentase 50,8% yang lalu berikutnya SMA berjumlah 16 responden yang mendapatkan persentase sebanyak 24,6% lalu ada Pascasarjana berjumlah 10 responden dengan persentase 15,4%, dan terakhir berjumlah 6 responden atau mendapat persentase 9,2% untuk Diploma.

4. Lama Bekerja

Berikut pengklasifikasian karakteristik responden berdasarkan lama bekerja:

Table 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persen
1 – 5	26	40,1%
6 – 10	11	16,9%
11 – 15	14	21,5%
>16	14	21,5%
Total	65	100%

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan tabel di atas, menyimpulkan untuk kategori lama bekerja, menunjukkan bahwa mayoritas responden yang telah lama bekerja sebagai staf keuangan selama 1 sampai 5 tahun sejumlah 26 responden dengan prosentase sebesar 40,1%, kemudian 6 sampai 10 tahun sejumlah 11 responden dengan prosentase 16,9%, lalu 11 sampai 15 tahun sejumlah 14 responden dengan prosentase 21,5, dan yang terakhir lebih dari 16 tahun sebanyak 14 responden dengan prosentase 21,5% juga.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Analisis ini dilaksanakan melalui penginputan hasil data dari penerimaan jawaban kuesioner responden. Data yang sudah diklasifikasikan ke dalam tabel lalu dianalisa sesuai hasil yang diberikan responden mencakup mean, minimum, maksimum, juga standar deviasi. Hasil perhitungan ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Table 4. 5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	65	11	29	40	34,75	3,288	10,813
X2	65	19	16	35	28,61	4,219	17,803
X3	65	11	24	35	29,66	3,088	9,540
Y	65	16	34	50	42,47	4,680	21,910
Valid N (listwise)	65						

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Menurut tabel tersebut terhadap jawaban responden, memperlihatkan nilai variabel X1 (Kualitas Informasi Keuangan) mendapat nilai dari responden dengan mengacu pada skala 1 - 5 didapatkan nilai rata-rata 34,75. Variabel X2 (Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah) mendapat nilai dari responden dengan mengacu pada skala 1 - 5 didapatkan nilai rata-rata 28,61. Variabel X3 (Sistem Pengendalian Intern) mendapat nilai dari responden dengan mengacu pada skala 1 - 5 didapatkan nilai rata-rata 29,66. Variabel Y (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) mendapat nilai dari responden dengan mengacu pada skala 1 - 5 didapatkan nilai rata-rata 42,47.

4.2.3 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas berfungsi guna mengetahui valid tidaknya suatu data yang diteliti. Data bisa disimpulkan valid apabila mendekati

persyaratan yakni r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dengan tingkat signifikan yang dipakai dalam pengujian ini adalah sebanyak 0,05 atau 5 %. Jika nilai Sig.<0,05 maka indikator yang digunakan bisa dikatakan valid.

Berikut hasil uji validitas dalam penelitian ini:

Table 4. 6 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	KIK_1	0,859	0,244	VALID
	KIK_2	0,856	0,244	VALID
	KIK_3	0,766	0,244	VALID
	KIK_4	0,784	0,244	VALID
	KIK_5	0,818	0,244	VALID
	KIK_6	0,800	0,244	VALID
	KIK_7	0,843	0,244	VALID
	KIK_8	0,896	0,244	VALID
X2	ALK_1	0,772	0,244	VALID
	ALK_2	0,802	0,244	VALID
	ALK_3	0,843	0,244	VALID
	ALK_4	0,855	0,244	VALID
	ALK_5	0,894	0,244	VALID
	ALK_6	0,880	0,244	VALID
	ALK_7	0,843	0,244	VALID
X3	SPI_1	0,787	0,244	VALID
	SPI_2	0,861	0,244	VALID
	SPI_3	0,913	0,244	VALID
	SPI_4	0,897	0,244	VALID

	SPI_5	0,759	0,244	VALID
	SPI_6	0,832	0,244	VALID
	SPI_7	0,844	0,244	VALID
	SPI_8	0,809	0,244	VALID
Y	TPKD_1	0,817	0,244	VALID
	TPKD_2	0,808	0,244	VALID
	TPKD_3	0,889	0,244	VALID
	TPKD_4	0,865	0,244	VALID
	TPKD_5	0,847	0,244	VALID
	TPKD_6	0,781	0,244	VALID
	TPKD_7	0,851	0,244	VALID
	TPKD_8	0,803	0,244	VALID
	TPKD_9	0,776	0,244	VALID
	TPKD_10	0,514	0,244	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

2. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan dengan tujuan guna menguji konsisten atau tidaknya instrumen penelitian dengan diukurnya koefisien *Cronbach Alpha*. Reliabel atau tidaknya suatu data tergantung jika *Cronbach Alpha* diatas 0,60 atau lebih dari 0,60 serta jawaban dari responden mengenai pernyataan yang sama secara berulang dan terhindar dari kekeliruan.

Berikut hasil dari uji reliabilitas pada penelitian ini:

Table 4. 7 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cornbach Alpha'</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kualitas Informasi Keuangan (X1)	0,934	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,930	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,935	0,60	Reliabel
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,905	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

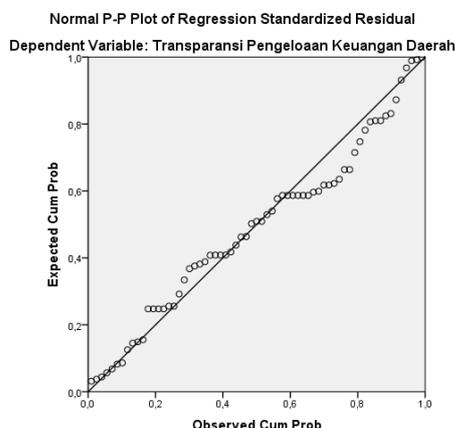
Dari penjelasan di atas menunjukkan jika nilai *Cornbach' Alpha* melebihi nilai 0,60 itu berarti seluruh variabel disimpulkan Reliabel, sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa apabila *Cornbach' Alpha* lebih dari 0,60 maka bisa disimpulkan reliabel.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ialah suatu pengujian dimana fungsinya ialah melakukan pengujian apakah variable pengganggu ataupun residual terdistribusikan secara normal atau tidak terhadap model regresi. Di bawah ini hasil uji normalitas pada penelitian:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan gambar 4.1, bisa disimpulkan jika hubungan kedua variabel telah terdistribusi secara normal, hal itu dibuktikan pada gambar histogram yang tidak terlalu melenceng ke kiri ataupun ke kanan dan penyebaran data terletak disekitaran garis diagonal. Sebab data bisa disimpulkan terdistribusi secara normal apabila penyebaran data atau titik berada di area sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya.

Table 4. 8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,21668301
Most Extreme Differences	Absolute	,117
	Positive	,117
	Negative	-,073
Test Statistic		,117
Asymp. Sig. (2-tailed)		,027 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Dari tabel di atas menunjukkan hasil uji normalitas dengan memakai uji *Kolmogorov Smirnov* (KS) didapat hasil *Asymp. Sig.* Sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05. Menurut aturan *Kolmogorov Smirnov*, apabila *Probability Value* > 0,05 maka H_0 diterima

(terdistribusi secara normal), sementara itu apabila *Probability Value* < 0,05 maka H_0 ditolak. Apabila data yang digunakan pada penelitian ini cenderung tidak normal maka bisa menggunakan penjelasan *Central Limit Theorem* yakni jika jumlah data penelitian lebih dari 30 ($n > 30$), maka asumsi uji normalitas bisa terabaikan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Kurnia Rahmadani, Edfan Darlis, dan Pipin Kurnia, dimana pada hasil pengujian normalitasnya terdistribusi tidak normal, tetapi dikarenakan sampel yang digunakan adalah lebih dari 30, maka data dianggap normal sesuai dengan penjelasan *Central Limit Theorem*.⁷⁰

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan guna mengetahui di dalam model regresi apakah ditemukan korelasi yang tinggi atau mendekati sempurna antar variable bebas. Tidak ditemukannya interkorelasi antar variabel merupakan suatu model regresi yang baik atau tidak terjadinya gejala multikolinearitas. Langkah paling efektif guna mengidentifikasi timbulnya gejala multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan memeriksa nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan syarat jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,00, oleh sebab itu dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut tidak ada gejala multikolinearitas.

Table 4. 9 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constants)	-0,223	0,306		-	0,470		
X1	0,513	0,112	0,451	4,564	0,000	0,360	2,777
X2	0,039	0,067	0,050	0,588	0,559	0,477	2,096
X3	0,491	0,109	0,451	4,513	0,000	0,352	2,840

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

⁷⁰ Kurnia Rahmadani, Edfan Darlis, and Pipin Kurnia, "Pengungkapan Lingkungan Perusahaan: Ditinjau Dari Manajemen Laba Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Yang Baik," *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini* 2, no. 1 (2021): 94–107. Hal. 101

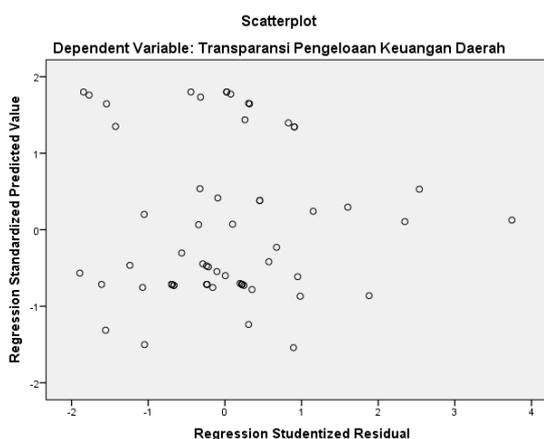
Dari tabel tersebut menampilkan semua variable bebas pada nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 itu artinya data yang terkait tidak ditemukan korelasi antara variabel independen, untuk nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) pun menunjukkan hal yang serupa yakni nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Maka dari itu, bisa disimpulkan jika pada data penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dipakai guna menilai apakah ada atau tidak terjadinya ketidakserasian varian dari suatu pengamatan residual ke pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik ialah tidak ditemukannya gejala heterokedastisitas, hal ini dikarenakan heterokedastisitas ialah satu dari banyaknya faktor yang menjadi penyebab model regresi linear tidak efisien juga akurat. Ada berbagai langkah guna mencari tau ada atau tidaknya heterokedastisitas, yakni:

a. Metode Grafik *Scatterplot*

Gambar 4.2
Grafik Scatterplot



Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Pada gambar 4.2 grafik *scatter plot* diatas dapat dilihat tidak adanya bentuk suatu pola yang jelas sebab titik-titik menyebar secara merata juga teracak, seluruh titik tersebar di atas juga di bawah angka 0 pada sumbu Y. oleh karena itu bisa diambil kesimpulan bahwa Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern

Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Uji *Gletser*

Pengujian uji *gletser* memakai cara dengan meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolut residualnya, apabila signifikasi antara variabel bebas dengan absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak akan terjadi heterokedastisitas. Uji *Gletser* ialah cara paling akurat untuk mengidentifikasi heterokedastisitas.

Table 4. 10 Uji Gletser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,081	,206		,394	,695
X1	-,034	,076	-,095	-,446	,657
X2	,019	,045	,079	,429	,670
X3	,034	,073	,100	,467	,642

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Dari tabel tersebut, hasil uji heterokedastisitas menampilkan hasil signifikan dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak adanya gejala heterokedastisitas.

4.2.5 Uji Ketepatan Model

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Table 4. 11 Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,886	0,786	0,775	0,22195

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan tabel 4.11, hasil uji koefisien determinan di atas memperlihatkan hasil nilai R Square (R^2) sebesar 0,786 atau 78,6% yang artinya 78,6% variasi transparansi pengelolaan keuangan daerah bisa diperjelas oleh kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan

keuangan dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama. Sedangkan 21,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Uji Simultan (Uji Statistik f)

Uji f merupakan uji yang bertujuan guna melihat ada tidaknya pengaruh variabel bebas (X) berpengaruh (bersama-sama) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan cara apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) atau $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$ maka adanya pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini f_{tabel} sebesar 2,75 didapat dari distribusi nilai f_{tabel} dengan rumus:

$$F_{\text{tabel}} = F(k ; n-k)$$

Keterangan:

k = jumlah variabel independen atau variabel X

n = jumlah sampel

$$F_{\text{tabel}} = F(F ; n-k) = F(3 ; 62) = 2,75$$

Berikut hasil uji F pada penelitian ini:

Table 4. 12 Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	11,017	3	3,672	74,551	0,000
Residual	3,005	61	0,049		
Total	14,022	64			

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan tabel 4.12, kolom F juga sig menampilkan hasil uji F di peroleh F hitung sebesar 74,551 dengan hasil F tabel sebesar 2,75 berarti F hitung lebih besar dari F tabel.dengan taraf signifikan sebesar 0,000 itu berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Itu berarti, variabel Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau uji parsial ialah uji yang bertujuan guna melihat apakah ada pengaruh parsial atau tidak ada pengaruhnya yang diberi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). hal ini dilakukan dengan merujuk pada apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) atau t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat pengaruh variabel X dan variabel Y. Pada uji parsial ini derajat kepercayaan yang dipakai ialah sebesar 0,05 atau $\alpha = 0,05$, pada penelitian ini t_{tabel} sebesar 1,99962 dihasilkan dari distribusi nilai t tabel dengan rumus:

$$T \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

Keterangan:

α = tingkat kepercayaan

k = jumlah variabel independen atau variabel X

n = jumlah sampel

t tabel = $t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 61) = 1,99962$

Berikut hasil uji t pada penelitian ini:

Table 4. 13 Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,223	0,306		-0,728	0,470
X1	0,513	0,112	0,451	4,564	0,000
X2	0,039	0,067	0,050	0,588	0,559
X3	0,491	0,109	0,451	4,513	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Dari penjelasan tabel di atas, pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dengan uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Variabel Kualitas Informasi Keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 itu berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dengan begitu dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan melihat antara nilai t hitung dengan nilai t tabel, Kualitas Informasi Keuangan memiliki nilai t hitung sebesar 4,564 dan nilai t tabel sebesar 1,99962 itu artinya nilai t hitung > t tabel ($4,564 > 1,99962$) maka bisa disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Keseluruhan simpulan pada hipotesi pertama ialah berpengaruh positif dan signifikan antara variabel Kualitas Informasi Keuangan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,559 itu berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,559 > 0,05$), maka disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan apabila diperbandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel, Aksesibilitas Laporan Keuangan bernilai t hitung sebesar 0,588 serta nilai t tabel sebesar 1,99962 yang berarti nilai t hitung < t tabel ($0,588 < 1,99962$). Maka hal tersebut menegaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari penjelasan, kesimpulannya yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan bila dilihat dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel, Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai t hitung sebesar 4,513 dan nilai t tabel sebesar 1,99962 yang berarti nilai t hitung > t tabel ($4,513 > 1,99962$). Maka hal tersebut menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2.6 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan dengan tujuan menyimpulkan bagaimana pengaruh antara Kualitas Informasi

Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut nilai regresi yang dihasilkan dari uji regresi linier berganda:

Table 4. 14 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-0,223	0,306		-0,728	0,470
X1	0,513	0,112	0,451	4,564	0,000
X2	0,039	0,067	0,050	0,588	0,559
X3	0,491	0,109	0,451	4,513	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Sesuai dengan tabel di atas di dapatkan nilai regresi linier berganda dengan memakai rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

α : Konstanta (Tetap)

β_1 - β_3 : Koefisien variabel bebas (independen), jika nilai β adalah (+) maka akan terjadi kenaikan pada variabel terikat (dependen) (Y), sedangkan jika nilai β (-) maka akan terjadi penurunan variabel terikat(dependen) (Y).

X1 : Kualitas Informasi Keuangan

X2 : Aksesibilitas Lapora Keuangan

X3 : Sistem Pengendalian Intern

ε : Kesalahan baku atau error

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -0,223 + 0,513 X_1 + 0,039 X_2 + 0,491 X_3$$

Interpretasi dari hasil regresi ialah sebagai berikut:

1) Kualitas Informasi Keuangan (X1) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai koefisien kualitas informasi keuangan (X1) ialah sebesar 0,513. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa, nilai Kualitas Informasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kualitas Informasi Keuangan sebesar 1% maka dapat menaikkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,513.

2) Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai koefisien Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) ialah sebesar 0,039. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa, nilai Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 1% maka dapat menaikkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,039.

3) Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai koefisien Sistem Pengendalian Intern (X3) ialah sebesar 0,491. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa, nilai Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sistem Pengendalian Intern sebesar 1% maka dapat menaikkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,491.

4) Konstanta (α)

Nilai konstanta adalah -0,223 artinya ketika variabel Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern sama dengan nol (0) maka Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami penurunan.

4.3 Pembahasan dan Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil uji hipotesis yang dilaksanakan juga yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulannya adalah variabel Kualitas Informasi Keuangan berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, hal tersebut didukung dengan bukti hasil uji t parsial bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh kualitas informasi keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,564 > t$ tabel $1,99962$ yang bisa disimpulkan bahwa H_1 **diterima** yang artinya adanya pengaruh X_1 terhadap Y atau bisa dikatakan kualitas informasi keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian ini, pengaruh kualitas informasi keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki arah koefisien positif sebesar $0,513$ atau $51,3\%$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap naiknya 1% kualitas informasi keuangan maka akan meningkat pula transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar $51,3\%$.

Menurut hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa kualitas informasi keuangan memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Demak sebesar $51,3\%$ yang artinya kualitas informasi keuangan daerah Kabupaten Demak sudah lumayan baik dan masih ada yang harus diperbaiki dan *diupgrade* lagi di masa mendatang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Kemala Sari Tambunan (2018) yang mengungkapkan bahwa kualitas informasi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kota Medan.

Semakin berkualitasnya penyajian laporan keuangan daerah tentunya bisa berpengaruh pada pelaporan keuangan pemerintah daerah sebab seluruh transaksi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku juga ditampilkan secara lengkap serta jujur maka laporan keuangan akan transparan dan juga mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza Masyhur (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

4.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan dan sudah dijelaskan sebelumnya, menyatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, hal itu diperjelas dengan hasil uji t parsial bahwa nilai signifikansi untuk aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar $0,559 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,588 < t \text{ tabel } 1,99962$ yang memiliki arti bahwa H2 **ditolak** yang artinya tidak adanya pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y atau bisa disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Charlie Andreas Saragih (2015) dan Mirza Masyhur (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan arah koefisien positif.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan Charlie Andreas Saragih (2015) dan Mirza Masyhur (2017) bisa timbul dikarenakan kemungkinan adanya faktor-faktor yang terjadi dari staf bagian keuangan sebagai responden dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan hasil pada penelitian dengan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Adanya perbedaan pada obyek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, obyek dalam penelitian ini ialah staf keuangan pada SKPD Kabupaten Demak, sedangkan obyek penelitian yang dilaksanakan oleh Charlie Andreas Saragih (2015) dan Mirza Masyhur (2017) adalah pemerintahan kabupaten Simalungun dan pemerintahan kota Dumai.
2. Responden pada penelitian ini sudah tidak ragu pada pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan atau responden lebih memerhatikan hal lain seperti program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Demak dalam mengungkapkan keuangannya dan sebagainya.

Meskipun secara hasil statistik variabel aksesibilitas laporan keuangan dinyatakan tidak signifikan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, bukan berarti pemerintahan kabupaten Demak menyulitkan masyarakat untuk mengakses segala yang berkaitan dengan laporan keuangan. Terbukti beberapa informasi mengenai laporan

keuangan sudah terpublikasi dimedia masa meskipun ada yang tidak dipublikasikan karena hal-hal tertentu, serta berdasarkan data frekuensi jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan dari kuesioner bahwa responden setuju jika pemerintah kabupaten Demak sudah menerapkan aksesibilitas yang mudah dalam melaporkan keuangannya. Dibawah ini terkait data frekuensi jawaban dari responden:

Table 4. 15 Frekuensi Jawaban Responden

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
Sangat Tidak Setuju							
Tidak Setuju	2	1	2	3	2	2	2
Ragu-ragu	11	8	10	1	7	9	10
Setuju	34	34	38	46	39	32	38
Sangat Setuju	18	22	15	15	17	22	15
Total	65	65	65	65	65	65	65

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan tabel di atas, diungkapkan bahwa dari 7 butir pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang aksesibilitas laporan keuangan rerata dari responden memberi jawaban setuju dan diposisi kedua responden menjawab sangat setuju berbanding dengan responden yang memberi jawaban ragu-ragu ataupun tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai staf bagian keuangan pada SKPD kabupaten Demak setuju bahwa pemerintahan kabupaten Demak sudah memberikan kemudahan dalam aksesibilitas laporan keuangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketiadaan pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan ini bukan berarti menunjukkan tidak adanya kemudahan dalam aksesibilitas laporan keuangan, tetapi dapat dimungkinkan bahwa mereka sudah tidak ragu lagi dengan pemerintahan kabupaten Demak dalam hal laporan keuangan.

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil uji hipotesis yang telah peneliti lakukan dan telah dijelaskan di atas, mengungkapkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, hal tersebut diperjelas dengan hasil uji t parsial bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,513 > t$ tabel $1,99962$ yang bisa diartikan bahwa H3 **diterima** yang artinya terdapat pengaruh X3 terhadap Y atau dapat dikatakan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, pengaruh sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki arah koefisien positif sebesar $0,491$ atau $49,1\%$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1% sistem pengendalian intern maka akan menaikkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar $49,1\%$.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, diketahui jika sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Demak sebesar $49,1\%$ yang artinya sistem pengendalian intern pada SKPD Kabupaten Demak sudah lumayan baik dan masih ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan dan *diupgrade* lagi kedepannya. Penelitian ini selaras dengan penelitian Embun Widya Sari (2017) yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan tercipta jika sistem pengendalian intern diterapkan secara tepat oleh tiap instansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmad Bintang Shabri Asroel (2016) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut hasil serta pembahasan penelitian yang sudah dilaksanakn mengenai pengaruh kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Demak di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji parsial diketahui jika tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,564 lebih besar dari t tabel 1,99962 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel kualitas informasi keuangan memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Demak
2. Dari hasil uji parsial diketahui jika tingkat signifikan sebesar 0,559 yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,588 lebih kecil dari t tabel 1,99962 yang berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangantida signifikan mempunyai pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Demak
3. Dari hasil uji parsial diketahui jika tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,513 lebih besar dari t tabel 1,99962 yang berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Demak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut keterbatasan yang dialami peneliti di dalam menjalankan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya keterbatasan dalam mengembangkan variabel, pada penelitian ini peneliti hanya memakai tiga variabel bebas, yakni kualitas informasi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern. Sehingga bisa dimungkinkan masih terdapat variabel lainnya yang masih perlu diteliti terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Dalam sistem penelitian ini, peneliti hanya memakai lembaran kuesioner sebagai alat penelitian, yang nampaknya bisa saja timbul terjadinya

kebiasan dalam pengisian kuesioner, responden tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi.

3. Dikarenakan ada beberapa yang tidak memberi respon dalam permohonan izin riset, juga adanya keterbatasan waktu serta biaya untuk dilakukannya penelitian sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menjadikan seluruh SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Demak untuk dijadikan sampel penelitian.
4. Hasil yang sudah diperoleh dalam penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Demak tidak bisa disama-ratakan dengan pemerintahan kota lainnya yang ada di Indonesia. Itu disebabkan adanya kemungkinan jawaban yang berbeda dari responden pada pemerintahan kota yang lain.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut adalah:

1. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan agar melakukan penelitian lebih dalam terkait semua faktor yang memengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah, oleh sebab itu penulis berharap peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel yang belum dibahas pada penelitian ini.
2. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan untuk kegiatan pengisian kuesioner ada baiknya responden dilakukan pendampingan secara langsung dalam pengisian oleh peneliti supaya informasi yang diperoleh lebih tepat.

5.4 Penutup

Alhamdulillah hirabbilalamin segala puji penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita terutama pada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Penulis sangat menyadari bahwa jika selama pengerjaan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, juga masih banyak kekurangannya terkait pengetahuan serta keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dan apabila ada kesalahan mohon penulis berharap diberikannya suatu kritikan juga pendapat yang memotivasi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa memiliki manfaat khususnya untuk diri penulis sendiri juga bisa menjadi sumber referensi bagi para penulis berikutnya yang akan melaksanakan penelitian sesuai dengan tema skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Uzaimi. "Teori Keagenan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* 1, no. 1 (2017): 71–78.
- Amaliah, Rezeki. "Hasil Belajar Biologi Materi Sistem Gerak Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) Pada Siswa Kelas XI SMAN 4 Bantimurung." *Jurnal Dinamika* 8, no. 1 (2016): 11–17. <https://ejournal.umm.ac.id>.
- Apip, M, and F Maesaroh. "Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis." *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi* 4, no. 1 (2016): 28–39. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jawara/article/view/3395>.
- Armando, Gerry. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Universitas Negeri Padang* (2013): Hal.27.
- Astuti, Adni Dwi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Via Website (Studi Empiris Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Periode 2018)." *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 132–138.
- Azizah, Nur, Junaidi -, and Achdiar Redy Setiawan. "Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Journal of Research and Applications: Accounting and Management* 1, no. 2 (2015): 111.
- E. Perdana K. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. Lab Kom Manajemen Fe Ubb*, 2016.
- Febriansyah, Angky. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung." *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2017).
- GOENAWAN, Goenawan, Bhakti S. Sastranegara, and Syamsu Rizal. "Pengaruh

Kualitas Laporan Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus Pada Pemda Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (2012).

Hardani, Ustiawaty, J. Andriani H. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017.

Hehanussa, Salomi J. “Kutip 1 (Salomi J. Hehanussa).” *Conference in Busniess, Accounting and Management* 2 (2015): 82–90.

Hendrawaty, Ernie. *Excess Cash Dalam Teori Keagenan*, 2017.

Kurniawati, Maria Magdalena Hesti. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember).” *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hata* 8 (2) (2016): 15–27. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73794>.

LAN & BPKP RI. “Akuntabilitas Dan Good Governance.” *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* (2000): 2.

Ledo, Dominikus, and Sri Ayem. “Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 25, no. 2 (2017): 161–175.

Lestari, Jihan Suci, Umi Farida, and Siti Chamidah. “Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan, Dan Lingkungan Kerjaterhadap Prestasi Kerja Guru.” *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 38–55.

Lu’lu Ul Maknunah & Kadela Reka Nur Laili. “Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Geti Kuda Terbang (Studi Kasus Di UD. Bu Sulasmi Kademangan).” *Jurnal Translitera* 8, no. 2 (2019): 34–43. <https://doi.org/10.35457/translitera.v8i02.890>.

M-progress, Jurnal Ilmiah, Pengaruh Pengembangan, Karier Dan, Disiplin Kerja, Sulisty Wardani, P Rita, and Intan Permatasari. “Pengaruh Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Staf Umum Bagian Pergudangan Penerbangan Angkatan Darat

(Penerbad) Di Tangerang.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 12, no. 1 (2022): 13–25.

Marsudi, S. Kar., M.Hum. *Metodologi Penelitian. Hand Out*, 2014.

Maryam. “Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

Mbipi, Saverius Dhuri, Prihat Assih, Maxion Sumtaky, Jl Terusan, and Raya Dieng. “Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah” 3, no. 2 (2020): 152–158.

Nordiawan, Deddy, Iswahyudi Sendi Putra, and Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan*, 2008.

Padilah, Tesa Nur, and Riza Ibnu Adam. “Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang.” *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* 5, no. 2 (2019): 117.

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Media Hukum* (2019): 184.

Pianto, Heru Arif. “Keraton Demak Bintoro Membangun Tradisi Islam Maritim Di Nusantara.” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2017): 18–26.

Prabawa, Sigit, Herman Karamoy, and Lidia Mawikere. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa).” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 269.

Psak, Penerapan, D A N Sikap, and Amil Terhadap. “(Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)” 1 (2021).

Purwanto, Nfn. “Variabel Dalam Penelitian Pendidikan.” *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215.

- Rahmadani, Kurnia, Edfan Darlis, and Pipin Kurnia. "Pengungkapan Lingkungan Perusahaan: Ditinjau Dari Manajemen Laba Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Yang Baik." *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini* 2, no. 1 (2021): 94–107.
- Regina, Rika. *Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2019)*, 2020.
- Salomi J. Hehanussa. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon." *Journal of Chemical Information and Modeling* 02, no. 01 (2015): 82–90.
- Setyowati, Lilis, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi, and Universitas Dian Nuswantoro. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN," no. 1 (n.d.): 179–192.
- Sholohah, Silvia Almar'atus, Ardiani Ika Sulistyawati, and Aprih Santoso. "Kualitas Laporan Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *Indonesia Accounting Journal* 1, no. 2 (2019): 45.
- Stawati, Vicka. "Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH PROFITABILITAS , LEVERAGE DAN UKURAN." *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi* 6, no. November (2020): 147–157.
- Sudiaranti, Ni Made. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Penelitian mandiri* 4, no. 71 (2015): 1–25.
- Supardi, Supardi. "Populasi Dan Sampel Penelitian." *Unisia* 13, no. 17 (1993): 100–108.
- Superdi. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)." *JOMFekom* 4, no. 1 (2017): 205–2019.

- Tadeko, Nuryani. "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai)" (n.d.): 104–115.
- Tolley, Sukma Selviany, Ridwan, and Muh Yunus Kasim. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Kabupaten Sigi." *Magister Pascasarjana Universitas Tadulako* (2017): Hal.179-190.
- Toto, and Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2012.
- Transparency International. *Corruption Perceptions*, 2018. <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah." *Dpr* (2004): 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284." *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 15–35.
- Widi, Ristya E. "Uji Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Epidemiologi Kedokteran Gigi." *Stomatognatic (J.K.G. Unej)* 8, no. 1 (2011): 27–34.
- Wijaya, Mirta, Neri Susanti, and Sulisti Afriani. "Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 2 (2017): 141–150.
- Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah. "PERWUJUDAN KEADILAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH : SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo" 9, no. 2 (2008): 108–124.
- Yosani, Clara. "Teknik Analisis Kuantitatif." *Makalah Teknik Analisis II* (2006): 1–7. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.

Zelmiyanti, Riri. “Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia).” *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK)* 7, no. 1 (2016): 11–21.

Zeny Antika, Yunika Murdayanti, and Hafifah Nasution. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Wahana Akuntansi* 15, no. 2 (2020): 212–232.

Zulkadri. “Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As- Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah.” *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* 1, no. 2 (2018): 231–244.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/135>

<https://www.bpk.go.id/ihps>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengisi daftar berikut:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur : tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMU/SMA/SMK Diploma
 Sarjana PascaSarjana
5. Nama Instansi :
6. Jabatan :
7. Masa Kerja : tahun

DAFTAR PERNYATAAN

Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan mengenai “Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Demak”.

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan tanda check list (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Adapun penjelasan skor sebagai berikut:

Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor 3 : Ragu-Ragu (RR)

Skor 4 : Setuju (S)

Skor 5 : Sangat Setuju (SS)

Kualitas Informasi Keuangan

No.	Deskripsi	1	2	3	4	5
-----	-----------	---	---	---	---	---

		STS	TS	RR	S	SS
1.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak selalu disajikan tepat waktu sesuai periode akuntansi					
2.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak menghasilkan informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan					
3.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan					
4.	Informasi Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu					
5.	Informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
6.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama					
7.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak menyajikan informasi yang jelas dan dapat dipahami					
8.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak menghasilkan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					

Aksesibilitas Laporan Keuangan

No.	Deskripsi	STS	TS	RR	S	SS
1.	Seluruh pengguna memiliki kemudahan yang sama dalam mengakses Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak					
2.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah					
3.	Masyarakat dapat mengakses Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak melalui media internet (<i>website</i>)					
4.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak memuat informasi yang sudah seharusnya terpublikasi					
5.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak dapat diakses dimanapun dan kapanpun					
6.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak dipublikasikan secara terbuka melalui media masa					
7.	Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak tidak dapat diakses melalui media masa dan internet					

Sistem Pengendalian Intern

No.	Deskripsi	STS	TS	RR	S	SS
1.	Lembaga atau instansi telah menerapkan kode etik secara tertulis					
2.	Pimpinan instansi/lembaga memberikan contoh dalam perilaku mengikuti kode etik					
3.	SKPD ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian internal dan manajemen terhadap					

	resiko					
4.	Setiap transaksi dan aktivitas telah didukung dengan otoritas dari pihak yang berwenang					
5.	SKPD ditempat saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai					
6.	SKPD ditempat saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab					
7.	SKPD ditempat saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit					
8.	Dalam waktu yang tidak ditentukan, pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Deskripsi	STS	TS	RR	S	SS
1.	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
2.	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan					
3.	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah					
4.	Laporan keuangan SKPD direview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
5.	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
6.	Dilakukannya finansial audit terhadap laporan					

	keuangan daerah					
7.	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD					
8.	Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas					
9.	Terdapat sistem untuk menyampaikan kritik dan saran					
10.	Pemerintah tidak menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					

2. Tabulasi Data

No. Responden	Kualitas Informasi Keuangan								Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	4	4	4	4	3	3	3	4	29
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	5	5	5	4	4	4	5	36
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	5	4	4	4	4	4	4	4	33
8	4	5	4	4	4	4	5	4	34
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	4	4	4	5	4	5	5	36
12	4	4	4	4	4	4	5	4	33
13	4	5	5	5	5	4	4	4	36
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	5	5	5	5	5	4	5	5	39
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	4	5	4	4	5	34

21	5	5	5	5	4	4	5	5	38
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	5	5	5	5	4	4	5	5	38
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	4	4	4	3	4	31
31	5	5	5	5	5	4	5	5	39
32	4	4	4	4	4	3	4	4	31
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	5	5	5	4	5	5	5	5	39
35	4	4	5	4	4	4	5	5	35
36	4	5	4	4	4	5	5	5	36
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	5	5	5	4	4	5	5	5	38
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	5	4	4	4	4	4	4	4	33
47	5	5	4	4	4	4	5	5	36
48	5	5	4	5	4	5	5	5	38
49	5	5	5	4	5	5	5	5	39
50	5	5	4	5	5	5	5	5	39
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	4	4	4	4	4	3	4	4	31
53	5	5	5	5	5	5	5	5	40
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40
55	5	5	4	5	5	5	5	5	39
56	5	5	5	4	5	4	5	5	38
57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40

60	4	5	4	4	4	4	4	4	33
61	4	4	5	4	4	4	4	4	33
62	4	5	4	5	4	4	4	4	34
63	4	4	5	4	4	4	5	4	34
64	4	5	4	4	4	4	5	4	34
65	4	4	5	4	4	4	5	5	35

No. Responden	Aksesibilitas Laporan Keuangan							Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	4	3	3	4	3	3	3	23
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	5	4	4	4	4	4	4	29
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	3	4	3	4	4	4	3	25
7	2	4	2	2	2	2	2	16
8	3	4	5	4	4	5	5	30
9	5	5	3	4	5	5	3	30
10	5	5	5	4	4	4	5	32
11	4	5	5	4	5	5	5	33
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	4	4	4	5	5	5	4	31
14	3	4	4	4	4	4	4	27
15	4	4	3	3	3	3	3	23
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	4	5	4	4	4	4	4	29
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	3	4	4	4	4	4	4	27
21	3	4	4	4	4	5	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	5	5	5	5	5	5	5	35
25	5	4	4	4	4	4	4	29
26	3	4	4	4	4	4	4	27
27	5	5	5	5	5	5	5	35
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	4	4	3	4	4	3	3	25
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	3	4	3	4	4	4	3	25
33	4	4	2	2	4	4	2	22
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	5	4	4	4	4	5	4	30
36	4	3	4	4	4	5	4	28

37	5	5	4	5	5	5	4	33
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	3	4	3	4	4	4	3	25
41	4	5	4	4	4	5	4	30
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	2	2	4	2	2	2	4	18
47	5	5	4	5	5	4	4	32
48	4	5	4	4	5	5	4	31
49	5	5	5	5	5	5	5	35
50	4	5	4	4	4	4	4	29
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	4	4	4	4	4	4	4	28
53	5	5	5	5	5	5	5	35
54	5	5	5	5	4	5	5	34
55	4	5	4	4	4	4	4	29
56	4	5	5	5	5	5	5	34
57	3	4	4	4	4	4	4	27
58	4	4	4	4	4	4	4	28
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	3	3	4	4	3	3	4	24
61	4	3	4	4	3	3	4	25
62	4	3	4	4	3	3	4	25
63	3	3	3	4	3	3	3	22
64	4	3	3	4	3	3	3	23
65	4	3	3	4	4	3	3	24

No. Responden	Sistem Pengendalian Intern								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	4	4	4	4	3	4	5	2	30
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	5	4	4	33
4	5	5	5	5	5	5	5	4	39
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32

7	4	4	4	2	4	4	4	2	28
8	4	5	4	4	4	4	4	4	33
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	4	5	5	4	4	5	4	4	35
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	5	4	4	4	5	4	4	34
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	4	4	4	4	4	4	5	4	33
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	3	31
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	5	5	5	5	4	5	5	5	39
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	3	3	4	4	3	3	28
31	4	5	5	5	4	5	5	5	38
32	4	5	5	5	5	5	5	5	39
33	4	4	4	4	3	4	4	2	29
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	5	5	4	4	4	4	4	4	34
36	3	4	4	5	4	5	4	5	34
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	4	4	5	4	4	4	4	4	33
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	4	4	4	4	4	5	4	5	34
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32

46	5	5	4	4	2	4	5	4	33
47	4	4	4	4	4	5	4	4	33
48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	4	4	4	4	4	4	4	4	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	5	5	5	5	5	5	5	5	40
54	5	5	5	5	4	4	5	4	37
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
60	4	4	4	4	4	4	4	4	32
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	4	4	4	4	4	4	4	4	32
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	4	4	4	4	4	4	4	4	32
65	4	4	4	4	4	4	4	4	32

No. Responden	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah										Total Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	38
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
7	4	4	4	4	2	4	4	2	2	4	34
8	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	43
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
11	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	44
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
13	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	46

14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	5	4	4	4	4	3	4	4	4	2	38
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
23	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	43
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
30	4	3	3	4	4	3	3	4	4	2	34
31	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	45
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
33	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	43
36	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	41
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
38	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	36
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
41	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	44
42	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
43	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	40
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
45	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	36
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
47	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	48
48	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	46
50	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
51	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
52	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41

53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
55	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	45
56	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
59	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
60	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	65	11	29	40	34,75	3,288	10,813
X2	65	19	16	35	28,61	4,219	17,803
X3	65	11	24	35	29,66	3,088	9,540
Y	65	16	34	50	42,47	4,680	21,910
Valid N (listwise)	65						

4. Uji Validitas

➤ Kualitas Informasi Keuangan

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	Total X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,686*	,567*	,630*	,687*	,647*	,695*	,778*	,859**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X1.2	Pearson Correlation	,686*	1	,591*	,739*	,598*	,643*	,697*	,717*	,856**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65

X1.3	Pearson Correlation	,567 [*]	,591 [*]	1	,586 [*]	,578 [*]	,474 [*]	,609 [*]	,682 [*]	,766 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X1.4	Pearson Correlation	,630 [*]	,739 [*]	,586 [*]	1	,615 [*]	,552 [*]	,497 [*]	,625 [*]	,784 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X1.5	Pearson Correlation	,687 [*]	,598 [*]	,578 [*]	,615 [*]	1	,663 [*]	,611 [*]	,684 [*]	,818 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X1.6	Pearson Correlation	,647 [*]	,643 [*]	,474 [*]	,552 [*]	,663 [*]	1	,644 [*]	,659 [*]	,800 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X1.7	Pearson Correlation	,695 [*]	,697 [*]	,609 [*]	,497 [*]	,611 [*]	,644 [*]	1	,780 [*]	,843 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X1.8	Pearson Correlation	,778 [*]	,717 [*]	,682 [*]	,625 [*]	,684 [*]	,659 [*]	,780 [*]	1	,896 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Total X1	Pearson Correlation	,859 [*]	,856 [*]	,766 [*]	,784 [*]	,818 [*]	,800 [*]	,843 [*]	,896 [*]	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

➤ Aksesibilitas Laporan Keuangan

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total X2
X2.1 Pearson Correlation	1	,597**	,515**	,654**	,667**	,579**	,515**	,772**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.2 Pearson Correlation	,597**	1	,519**	,564**	,787**	,731**	,519**	,802**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.3 Pearson Correlation	,515**	,519**	1	,699**	,587**	,648**	1,000**	,843**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.4 Pearson Correlation	,654**	,564**	,699**	1	,764**	,685**	,699**	,855**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.5 Pearson Correlation	,667**	,787**	,587**	,764**	1	,876**	,587**	,894**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.6 Pearson Correlation	,579**	,731**	,648**	,685**	,876**	1	,648**	,880**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65
X2.7 Pearson Correlation	,515**	,519**	1,000**	,699**	,587**	,648**	1	,843**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65
Total X2 Pearson Correlation	,772**	,802**	,843**	,855**	,894**	,880**	,843**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	65	65	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

➤ Sistem Pengendalian Intern

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Total X3
X3.1 Pearson Correlation	1	,804**	,718**	,609**	,511**	,516**	,761**	,462**	,787**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X3.2 Pearson Correlation	,804**	1	,800**	,699**	,509**	,719**	,766**	,562**	,861**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X3.3 Pearson Correlation	,718**	,800**	1	,802**	,662**	,731**	,832**	,628**	,913**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65

X3.4	Pearson Correlation	,609**	,699**	,802**	1	,603**	,699**	,777**	,779**	,897**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X3.5	Pearson Correlation	,511**	,509**	,662**	,603**	1	,635**	,460**	,656**	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X3.6	Pearson Correlation	,516**	,719**	,731**	,699**	,635**	1	,629**	,661**	,832**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X3.7	Pearson Correlation	,761**	,766**	,832**	,777**	,460**	,629**	1	,517**	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
X3.8	Pearson Correlation	,462**	,562**	,628**	,779**	,656**	,661**	,517**	1	,809**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Total X3	Pearson Correlation	,787**	,861**	,913**	,897**	,759**	,832**	,844**	,809**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

➤ Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Correlations

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Total Y
Y1 Pearson Correlation	1	,680**	,819**	,786**	,667**	,612**	,769**	,604**	,636**	,202	,817**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,106	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y2 Pearson Correlation	,680**	1	,739**	,757**	,606**	,556**	,644**	,605**	,609**	,340**	,808**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,006	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y3 Pearson Correlation	,819**	,739**	1	,848**	,720**	,728**	,829**	,655**	,636**	,312*	,889**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,011	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y4 Pearson Correlation	,786**	,757**	,848**	1	,809**	,651**	,746**	,590**	,604**	,304*	,865**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,014	,000
N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Y5	Pearson Correlation	,667**	,606**	,720**	,809**	1	,677**	,719**	,740**	,719**	,242	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,052	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y6	Pearson Correlation	,612**	,556**	,728**	,651**	,677**	1	,774**	,597**	,510**	,282*	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,023	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y7	Pearson Correlation	,769**	,644**	,829**	,746**	,719**	,774**	1	,742**	,559**	,242	,851**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,052	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y8	Pearson Correlation	,604**	,605**	,655**	,590**	,740**	,597**	,742**	1	,735**	,221	,803**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,077	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y9	Pearson Correlation	,636**	,609**	,636**	,604**	,719**	,510**	,559**	,735**	1	,205	,776**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,101	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Y10	Pearson Correlation	,202	,340**	,312*	,304*	,242	,282*	,242	,221	,205	1	,514**
	Sig. (2-tailed)	,106	,006	,011	,014	,052	,023	,052	,077	,101		,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Total Y	Pearson Correlation	,817**	,808**	,889**	,865**	,847**	,781**	,851**	,803**	,776**	,514**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5. Uji Reliabilitas

➤ X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,934	8

➤ X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,930	7

➤ X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,935	8

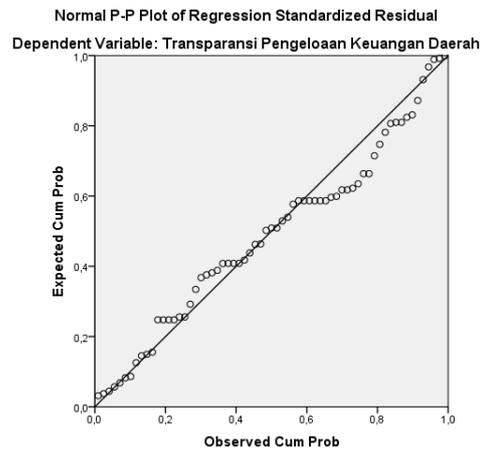
➤ Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,905	10

6. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,21668301
Most Extreme Differences	Absolute	,117
	Positive	,117
	Negative	-,073
Test Statistic		,117
Asymp. Sig. (2-tailed)		,027 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

b. Uji Multikolinearitas

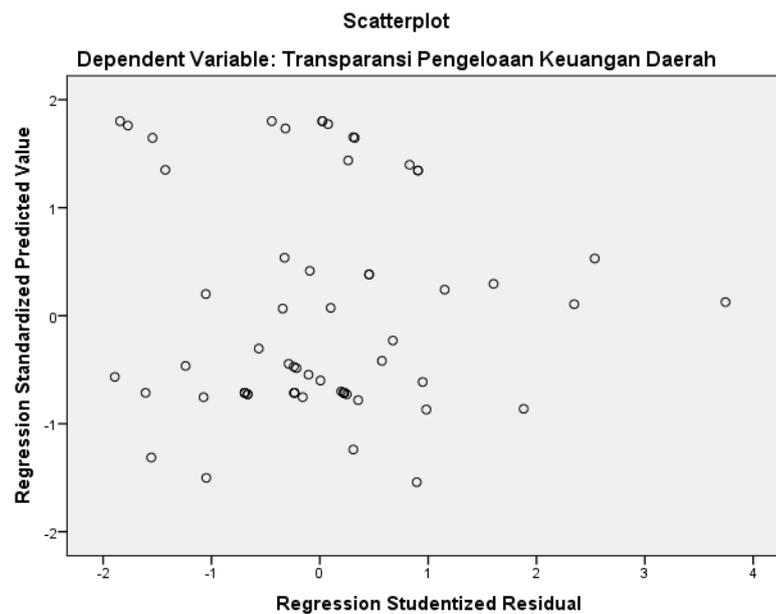
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,223	,306		-,728	,470		
	X1	,513	,112	,451	4,564	,000	,360	2,777
	X2	,039	,067	,050	,588	,559	,477	2,096
	X3	,491	,109	,451	4,513	,000	,352	2,840

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Uji Heterokedastisitas

➤ Metode Grafik *Scatterplot*



➤ Uji *Gletser*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,081	,206		,394	,695
X1	-,034	,076	-,095	-,446	,657
X2	,019	,045	,079	,429	,670
X3	,034	,073	,100	,467	,642

a. Dependent Variable: Abs_RES

7. Uji Ketepatan Model

➤ Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,886 ^a	,786	,775	,22195

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kualitas Informasi Keuangan

b. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

➤ Uji Simultan (Uji Statistik f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,017	3	3,672	74,551	,000 ^b
	Residual	3,005	61	,049		
	Total	14,022	64			

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kualitas Informasi Keuangan

➤ Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,223	,306		-,728	,470
	X1	,513	,112	,451	4,564	,000
	X2	,039	,067	,050	,588	,559
	X3	,491	,109	,451	4,513	,000

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,223	,306		-,728	,470
X1	,513	,112	,451	4,564	,000
X2	,039	,067	,050	,588	,559
X3	,491	,109	,451	4,513	,000

a. Dependent Variable: Transparansi Pengeloaan Keuangan Daerah

9. Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79

10. Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ita Audina
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 10 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Ds. Ngaluran, kec. Karanganyar, kab. Demak

Riwayat Pendidikan

1. TK Pamardisiwi : Tahun Lulus 2005
2. SDN Ngaluran 03 : Tahun Lulus 2011
3. SMPN Gajah 01 : Tahun Lulus 2014
4. SMAN Demak 03 : Tahun Lulus 2017
5. S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pengalaman Organisasi

1. Racana Walisongo periode tahun 2017/2018
2. Walisongo English Club periode tahun 2017/2018
3. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) periode tahun 2017/2018

Motto Hidup

“Being able to express yourself is the best thing you can ever have”

Media Komunikasi

Instagram : ita.audina
No. Hp. : 08982695577
Email : Audinaita7@gmail.com